

**LKJ TRIBULAN III
KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN LUMAJANG**

TAHUN 2023

RATA PENDAHULUAN

Dengan memerlukan pugi nyata kehadiran Ahok BPK, atas segala rahmat dan kebaikannya. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perwakilan Kabupaten Lumajang Triwulan III Tahun 2023 dapat dilaksanakan. Laporan ini merupakan informasi kinerja Dinas Perwakilan Kabupaten Lumajang, yang dituliskan berisi gambaran umpan baliknya selama kurun waktu triwulan dan menjelaskan ketekunan dalam mengelaksanakan tugas dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Rencnas) Dinas Perwakilan Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023.

Laporan Kinerja triwulan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, di dalam Peraturan Presiden tersebut menyatakan setiap instansi Pemerintah sebagai unsur pengelenggaran Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan ketekunan/kemajuan pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara terukur dengan sasaran/tujuan kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Perregapan laporan kinerja berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyajikan Teknis Perjalinan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan penilaian Penyelenggaraan Penitipan Kinerja dan Rata Cera Revu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Lumajang No.6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja.

Bermohon Laporan Kinerja Triwulan Dinas Perwakilan Kabupaten Lumajang ini disusun. Semoga dapat memberikan manfaat untuk perbaikan pertanggungjawaban, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan serta pemungkatan kinerja.

Lumajang, 09 Oktober 2023

Kepala Dinas Perwakilan
Kabupaten Lumajang


YULI HARSSMA WATIL, SP
NIP. 19690703 199402 2 002

INTITULAI KINERJA

Laporan Kinerja Triwulan 3 Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Dinas Perwakilan Kabupaten Lumajang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sesuai Peraturan Menteri Penitipan dan Pengembangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Kinerja, Pengembangan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Bupati Lumajang No.6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja.

Dinas Perwakilan Kabupaten Lumajang sebagai Instansi pemerintah wajib untuk menyusun Laporan Kinerja. Dalam rangka mewujudkan tercapainya Visi dan Misi Dinas Perwakilan Kabupaten Lumajang perlu adanya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Rencara), adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Perwakilan Kabupaten Lumajang pada tahun 2023 merupakan 1 (satu) tujuan, 3 (tiga) sasaran dan 3 (tiga) indikator sasaran utama. Pengukuran keberhasilan atau kraggalan dalam capaiannya setiap sasaran. Laporan Kinerja ini dianeksasikan sebagai berikut:

1. Makna dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk memantapkan kinerja Dinas Perwakilan lebih akuntabel dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perwakilan serta keberhasilan dalam mewujudkan Visi, Misi, dan tujuan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih baik dengan pencapaianannya seiring dalam perwujudan pelaksanaan sistem pertanggungjawaban kinerja yang lebih jelas, tepat, terukur dan legitimate dalam mendukung profesional kinerja pekerjaan.
2. Bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini telah melibatkan tim yang dibentuk oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perwakilan Kabupaten Lumajang Tahun 2023,
3. Pengusulan Laporan Kinerja ini masih merupakan hasil kerja Dinas Perwakilan Kabupaten Lumajang, dikarenakan persetujuan Bupati Dinas Perwakilan Kabupaten Lumajang baru diberikan pertama kalinya tanggal 4 Februari 2023.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem yang tepat, jelas, transparan dan legitimate. sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdirga guna, berhasil guna, teruji dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Berhubungan dengan hal tersebut, untuk mempercepat diadakan reformasi birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan diatur dalam TAP MPR RI No. XXIV/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Berjalan dengan reformasi birokrasi, pemerintah terus memperkuat posisi strategis pemerintah daerah untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat melalui otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab. Reformasi pemerintahan daerah terus diwujudkan dengan mengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Seiring dengan penguasa posisi pemerintah daerah, pemerintah bersama DPR memperkuat sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2005-2010. Dengan demikian, ada tiga paket undang-undang yang menopang Sistem Akhir yaitu (paket undang-undang tentang keuangan, paket undang-undang tentang perencanaan pembangunan nasional dan paket undang-undang pemerintahan daerah). Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah juga datur dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terciptanya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) di Indonesia.

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Perwakilan Kabupaten Lumajang merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberdayakan sebagai salah satu instansi Pemerintah di Kabupaten Lumajang atau penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapannya (disclosure) secara memadai hasil analis terhadap pengukuran kinerja yang telah dilakukan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Dengan adanya LKJ, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang berkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsiya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realitasnya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rendama kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

Penyusunan LKJ diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKJ pada dasarnya menyajikan informasi tentang ukuran singkatan organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi berakhir yang sebenarnya terwujud.

Keterbukaan pemerintahan dalam bidang publik mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur negara yang memiliki kapabilitas dan kapabelitas dalam bertanggungjawab, transparan, profesional dan akuntabel. Selain penyelenggara pemerintahan di lingkungan Kabupaten Lumajang harus mampu menampilkkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsiya sehingga terjadi sinergisitas antara perincianan ideal yang disanangkan dengan ukuran keterbukaan yang ditetapkan.

Dengan semangat inovasi dan nilai pembangunan yaitu "TAKSIAMANAH MASTAKAMAH YANG BERDAYA SAING, INOVASI DAN SEMANGATABERI" serta menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) menuju pemerintahan yang bersih (Open Government), Pemerintah Kabupaten Lumajang menyusun Laporan Akontabilitas Kinerja Tahun 2023.

Setiapunit Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Perwakilan Kabupaten Lumajang Tahun 2023 menyajikan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan oleh Bupati Lumajang dalam PRP(M) tahun 2018 – 2023 berdasarkan urusan perwakilan dan urusan kebudayaan disampaikan kepada Presiden RI melalui Menteri Negara

Pendekripsi Aparatur Negara dan Kinerja Birokrasi, Gubernur Jawa Timur
dan Republik Demokratik Republik Lumajang.

B. MAKNA DAN TUJUAN

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang Tahun 2023 ini merupakan bagian tak terpisahkan dari siklus akuntabilitas kinerja yang uluh yang dikembangkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang.

Laporan ini kami maksudkan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang Tahun 2023 secara manajerial kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang dan seluruh stakeholders (DPRD dan masyarakat), dengan tujuan:

- a. Memberikan informasi mengenai kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang Tahun 2023, yang merupakan periode tahun keempat dalam kerangka perencanaan jangka menengah, sebagaimana dokumen R-Renstra 2018- 2023;
- b. Sebagai media evaluasi kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang Tahun 2023, dalam upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa depan;
- c. Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja dimasa mendatang;
- d. Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) menuju pemerintahan yang bersih (clean government), dan untuk memenuhi tiga pilor utama tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang hendak dicapai selama jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang yang sebaiknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan atau kendala dalam pelaksanaannya, adapun Visi, Misi dan Tujuan yang harus dicapai oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

**"TERWILAYAH MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA SAING,
MAJU DAN BERMARTABAT"**

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang adalah "Meningkatnya PDRB Sektor Pariwisata". Dalam upaya untuk meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto dari Sektor Pariwisata di Lumajang, maka pengembangan kependidikan di Kabupaten Lumajang harus dilakukan dengan sejajar dengan meningkatnya destinasi wisata yang memadai, pengembangan potensi pariwisata baik di tingkat nasional maupun Internasional beserta ekonomi kreatif sebagai daya tarik yang akan mengantarkan kenangan dari Lumajang.

Tujuan merupakan perjalanan atau implementasi dari pernyataan misi, tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau diperoleh dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang adalah "Meningkatnya PDRB Sektor Pariwisata". Dalam upaya untuk meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto dari Sektor Pariwisata di Lumajang, maka pengembangan kependidikan di Kabupaten Lumajang harus dilakukan dengan sejajar dengan meningkatnya destinasi wisata yang memadai, pengembangan

potensi pertambahan bank ditengah masyarakat metropolitan beserta ekonomi kreatif sebagai pilar ekonomi yang akan memperkuat kemajuan dan kemandirian.

Batasan merupakan hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu yang terbatas, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkembangnya sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun batasan dan indikator yang ditetapkan Dinas Perindustrian Kabupaten Lamongan serta keterkaitannya dengan Tujuan yakni:

1. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan.
2. Meningkatnya Rata Rata Lama Tinggal Wisatawan.
3. Meningkatnya Persentase usaha pemula dan ukuran kredit yang memenuhi standart.

Untuk melihat ketercapaian sesiapa si maka diperlukan pengukuran yang tepat melalui indikator :

1. Jumlah Kunjungan Wisatawan.
2. Rata Rata Lama Tinggal Wisatawan.
3. Persentase Usaha Pemula dan Ekspansi Kredit Yang Memenuhi Standart.

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan dasar-dasar, pertemuan dan makna sebuah negara dalam kurun waktu tertentu. Pembangunan dibidang Koperasi dan Koperasi yang ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran, diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program.

Kebijakan merupakan arah/tujuan sebagai dasar untuk dipakai pedoman atau perunjuk dalam melaksanakan program dan kegiatan agar tercapai ketepatan dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Sedangkan program merupakan instrumen kebijakan yang bersifat kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang diaksualkan oleh instansi atau manuskrip yang dikordinasikan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Lamongan.

Adapun Strategi dan kebijakan Dinas Perindustrian Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

"Mewujudkan Perkembangan Daerah Berkarakter yang Bertaraf pada Pertanian, Usaha Mikro dan Perindustrian"

D. INDIKATOR KINERJA OPD

Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan Kabupaten Lumajang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188-KB/1804/27/12/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perkebunan Kabupaten Lumajang dan Organisasi Pengelola Daerah di Lingkungan Perkebunan Kabupaten Lumajang sesuai P-RPPMD Tahun 2018 – 2023. Dalam rangka peningkatan dan pengembangan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi Perkebunan, maka selanjutnya perkebunan perlu membangun Institutor Kinerja Utama (IKU).

Tujuan Penetapan IKU antara lain:

- I. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam memperbaiki dan mengoptimalkan manajemen kinerja secara baik;
- II. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk pertambahan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;

Untuk mengetahui ketepatan pencapaian sasaran strategis, dukur dengan indikator yakni "Jumlah Kunjungan Wisatawan".

Tabel 2.1.
Makna Hubungan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(I) Meningkatnya aktivitas ekonomi / non PDRM	Nilai PDRM		
		Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan
		Meningkatnya Rata- rata Lama Menginap Wisatawan	Rata-rata Lama Menginap Wisatawan
		Meningkatnya Peningkatan Usaha Perkebunan dan Ekonomi Komoditi yang Menumbuhkan Ekosistem	Peningkatan Usaha Perkebunan dan Ekonomi Komoditi yang Menumbuhkan Ekosistem

E. RENCANA KERJA TAHUN 2023

Urutan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan kembali diaturkan dalam target kerja untuk pencapaian sasaran jangka pendek (tahunan). Target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis seperti pencapaian target jangka menengah 5 tahunan. Tabel diatas ini berisi indikator dan target kerja untuk setiap sasaran pada tahun 2023. Setiap sasaran telah diaturkan dalam indikator dan target kerja yang spesifik dan terukur.

Tabel 2.2.1
Rencana Kerja Tahun 2023

MKJ	GASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	554.000 orang
2.	Meningkatnya Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	1.30 hari orang
3.	Meningkatnya Persentase Usaha Perkotaan dan Ekonomi Kreatif yang Memenuhi Standart	Persentase Usaha Perkotaan dan Ekonomi Kreatif yang Memenuhi Standart	7.8%

Tabel 2.2.2
Program dan Kegiatan Pelaksanaan Sasaran Tahun 2023

MKJ	GASARAN STRATEGIS	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	5	15
2.	Meningkatnya Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	5	10
3.	Meningkatnya Persentase Usaha Perkotaan dan Ekonomi Kreatif yang Memenuhi Standart	3	11
	TOTAL	13	43

P. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Peraturan Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan kebutuhan dan perjuangan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rangka wujud tujuan tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimilikinya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara pemerintah daerah dan pemda di bawahnya sebagai dasar penilaian ketercapaian reward atau penghargaan dari tuntutan Perjanjian Kinerja Tahun 2023: Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang.

Perjalanan pelaksanaan perjanjian kinerja dimungkinkan terjadi, dimana pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang terjadi dikarenakan beberapa hal diantaranya :

1. Adanya perubahan Rencana Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2023, sehingga adanya perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran) pada perkembangan tahun melalui penambahan APBD

Tabel 2.3.1
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

NO	BASAHAM STRATEGIS (1)	MOMEN TAHUNAN (2)	TARGET (3)
1	Meningkatnya Jumlah Kurangpaik Wastawean	Jumlah Kurangpaik Wastawean	304.950 unit
2	Meningkatnya Tingkat Larisa Tinggi Wastawean	Rasio Ting Larisa Tinggi Wastawean	1.20 Rasio
3	Meningkatnya Peningkatan Upah Perwakil dan Ekspresi Kreatif yang Wainantri Sinyal	Persentase Upah Perwakil dan Ekspresi Kreatif yang Memenuhi Standart	1.00%

Tabel 2.3.2.
Anggaran Tahun 2023

NO	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1.	Program Penunjang Usaha Pemerkirahan Ekonomi Keluarga/Kota	4.679.268.117,-
2.	Program Pengelolaan Daya Tanah Desentralisasi Perwakil	4.032.858.519,-
3.	Program Perusakan Perwakil	1.242.862.000,-
4.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Penerapan dan Perkembangan Hukum Kekayaan Intelektual	1.862.729.250,-
5.	Program Pengembangan Sumber Daya Perwakil dan Ekonomi Kreatif	2.648.892.000,-
		18.342.827.386,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Perkebunan Kabupaten Lumajang tidak terlepas dari rangkaian makrosistem fungsi pemantauan yang sudah berjalan di Tahun Pertama Perencanaan Strategis (Rencda) Tahun 2018-2023 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Pelaporan Kinerja (PK) yang seharusnya juga menggunakan Realisasi Anggaran Tahun 2023.

Pertanggungjawaban kinerja perkembangan pembangunan dilalui tata cara yang dikenakan standar pengukuran antara yang diukur dengan pranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai pranti perencanaan yang telah dibuat. Pranti pengukurannya berupa Pengukuran Kinerja yang membandingkan sejauh (performance gap) antara target kinerja dengan kinerja aktual.

A. PENGUKURAN KINERJA

Kerangka Pengukuran Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Lumajang menggunakan perselisihan yaitu performa untuk melakukan pengukuran dan evolusi capaian kinerja mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yaitu membandingkan antara target kinerja instikatif sasaran strategis dan/atau indikator kinerja utama (IKU) yang sudah dituangkan dalam Pelaporan Kinerja. Berikutnya, ketika, dalam melaksanakan pemantauan terhadap kategori capaian kinerja dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAH Nomor 238/10/3/16/2020 tentang Perbaikan Pedoman Penyelenggaraan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

- Apabila semakin tinggi realisasi mensyaratkan pemakai anggaran kinerja atau semakin rendah resursi mensyaratkan semakin rendahnya kinerja maka dituliskan rumus:

Capaian Indikator Kinerja	Realisasi Rencana	R	100%
---------------------------	-------------------	---	------

3. Jika akurasianya benar-benar, pada setiap semester tinggi realisasi menunjukkan semakin mendekati kinerja dan semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

Capatan Institusi	Rencana – (Rencana + Pelaksana)	x 100%
Kinerja	Pelaksana	

Pendekan capatan kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yang dapat dilihat pada Tabel 3.1 yaitu:

Tabel 3.1 Skala ordinal dan predikat

> 85	Sangat Berhasil
70 < X ≤ 85	Berhasil
55 < X ≤ 70	Cukup Berhasil
< 55	Tidak Berhasil

Pendekan capatan kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yang dapat dilihat pada Tabel 3.1 yaitu:

Tabel 3.1 Skala ordinal dan predikat

> 85	Sangat Berhasil
70 < X ≤ 85	Berhasil
55 < X ≤ 70	Cukup Berhasil
< 55	Tidak Berhasil

Untuk capatan masing-masing indikator kinerja sasaran diimpuksikan berdasarkan "Metode Rata-rata Terimbang Kelompok Indikator Kinerja untuk Setiap Sasaran Strategis". Penyimpulan capatan kinerja sasaran strategis dengan tetap mengacu pada kategori diatas. Formula yang digunakan sebagai berikut:

Capatan Kinerja Sasaran	Total Rata Capatan Kelompok Indikator	x 100 %
	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	

C. CAPAIAN, ANALISA, DAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2023

Berdasarkan Cetak Perkiraan Riset dan Pengembangan Lumbang telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023. Pencairan kinerja Tahun

Anggaran 2023 sudah mengacu dan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 dan Perjanjian Kerja (PK) Tahun 2023 sebagaimana telah disetujui oleh Bupati Lumajang. Capaian Tujuan dan sasaran yang mencapai target kinerja Dinas Penempatan Kabupaten Lumajang Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.3 ini.

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Tujuan Tahun 2023

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Rmk.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=((5)/(4))	(7)
UNJUAN PANTENSIATA						
1	Meningkatnya Hasil PDRD Sektor Pantenasiata	Nilai PDRD Sektor Pantenasiata	nila	nila	nila	

Berdasarkan Tabel 3.2 menunjukkan nilai target PDRD sektor pantenasiata masih belum dapat dihitung nilainya, karena data tersebut diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) yang penghitungannya dilakukan satu tahun sekali.

Data realisasi capaian sasaran kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.4 diawah ini.

Tabel 3.4
Pencapaian Sasaran Kinerja Tahun 2023 (Tribulasi III)

BASARAH	INDIKATOR BASARAH	KINERJA				Sampel Akhir Ramuan
		Target Sasaran	Realisasi Sasaran	Capaian %	Kategori	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=((3)/(4))	(6)	(7)
UNJUAN PANTENSIATA						
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	804.000 Orang	419.280 Orang	52,0%	-	804.000 Orang
Meningkatnya Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	1,30 Hari	1 Hari	76,92%	-	1,30 Hari
Meningkatnya Persentase Usaha Penempatan dan Dinas yang Memenuhi Standar	Persentase Usaha Penempatan dan Dinas yang Memenuhi Standar	7,00 %	7 %	100,74%	-	7,00 %

Tabel 3.6
Cost Per Output Berdasarkan Strategi Tahun 2023 (Triliun Rupiah)

Klasifikasi Program	Institutor Kinerja	Anggaran			Pisangan			Sisa
		Pagu	Rendah	%	T	B	%	
Meningkatkan Kepengrahan Wiskottawian	Jurusan Pengembangan Wiskottawian				1004.992.000	479.383.000	47.8%	52.0%
Meningkatkan kualitas Lahan Tropis Wiskottawian	Kata-kata Lahan Tropis Wiskottawian				1.332.000.000	1.000.000.000	75.0%	11.0%
Meningkatkan Pengetahuan Ilmu Pengetahuan dan Keterampilan yang Memadai Standar	Pengetahuan Ilmu Pengetahuan dan Keterampilan yang Memadai Standar				1.000.000.000	750.000.000	75.0%	25.0%
Program Pengembangan Daya Tantik Diketahui Pengetahuan	Pengetahuan Daya Tantik Diketahui Pengetahuan Yang Memadai Kriteria Sd	4.000.000.000	3.000.000.000	75.0%	8.3%	6.0%	75.0%	0
Program Pemuliharaan Pengetahuan	Pengetahuan (PP) Diketahui Pengetahuan Pada-pada yang dibutuhkan	1.340.000.000	100.000.000	7.5%	10.0%	8.0%	60.0%	0.0%
Program Pengembangan Ekosistem Kreatif melalui Pengetahuan dan Perkembangan dan Keterlibatan Komunitas	Pengetahuan Industri ekosistem kreatif yang berkembang	1.000.000.000	600.000.000	60.0%	8.0%	6.0%	60.0%	0.0%
Program Pengembangan Sumber Daya Pengetahuan dan Keterampilan Rukun	Pengetahuan SDM Pengetahuan dan Keterampilan Kreatif yang berkembang	3.000.000.000	1.200.000.000	40.0%	20.0%	10.0%	66.7%	0.0%
Program Pengembangan Sumber Daya Pengetahuan dan Keterampilan Rukun	Pengetahuan pengetahuan berkembang dengan pengetahuan	8.000.000.000	600.000.000	7.5%	100.0%	80.0%	100.0%	0.0%
Total Anggaran		16.340.000.000	6.430.000.000					

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LK) Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang Tahun 2023 merupakan bentuk perlengkapan wajib atas pelaksanaan kinerja yang telah dilakukan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Prinsip akuntabilitas kinerja berarti bahwa terdapat keterkaitan yang jelas antara tujuan dan fungsi organisasi (struktur organisasi) dengan struktur program dan kegiatan (indikator anggaran). Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang melaksanakan tujuh urusan yakni urusan pihak yang didukung oleh berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan.

Pengukuran dan penilaian Laporan Kinerja (LK) pada Dinas Pariwisata dan Kabupaten Lumajang dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai hasil evaluasi kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang dapat diimplikasikan bahwa indikator sasaran strategis didalam Rencana Strategis (Renstra) sudah mendekati target sasaran strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Lumajang. Pada Tahun 2023 Kunjungan Wisatawan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya hal ini disebabkan karena meredanya pandemi Covid-19 di Indonesia menjadi level 1 dan dicabutnya status PPnBM langsung oleh Presiden RI sehingga keadaan mulai normal dan pulih salah satunya dengan dibukanya tempat wisata. Nilai PDRB sektor pariwisata belum dicapai hasilnya karena masih proses perhitungan.

Obyektivitas informasi dan penetapan indikator kinerja dan penyajian angka-angka untuk pencapaian kinerja diperoleh dari konsep Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang Tahun 2019 – 2023 yang dilatarbelakangi dari komitmen yang dibangun dari seluruh potensi yang ada.

Demikian beberapa hal yang dapat disajikan dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulan ini, semoga dan祝福 selalu diberikan untuk penyelesaian penyusunan laporan kinerja pada waktu mendatang dan dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Lumajang, 09 Oktober 2023

KEPALA DINAS PARIWISATA



YULI HARISMA WATIL, S.P.

NIP. 19800703 199602 2 003

**LAPORAN KINERJA
JABATAN FUNGSIONAL UMUM
TRIMESTER III TAHUN 2023**

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada masyarakat, secara prinsip merupakan kewajiban yang melukat dan perwujudan sikap yang akurasi terhadap kinerjanya. Laporan Kinerja ini disampaikan untuk menggariskan hasil kinerja di objek wisata terhadap Prosentase kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 ini disajikan kondisi keberhasilan maupun ketidakberhasilan Prosentase kinerja sebagai petugas administrasi loket di Objek Wisata Rancabali.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara petugas administrasi loket di Objek Wisata Rancabali dengan Kepala Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata adalah dengan menyatakan menjajikan akan mewujudkan target kinerja dengan sejalan kegiatan pada meningkatnya pelayanan kepariwisataan di objek wisata maliput :

1. Jumlah kebersihan objek wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten yang dijaga
2. Jumlah keindahan objek wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten yang dijaga
3. Jumlah kesanaman objek wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten yang dijaga

2.2. Prosentase Kinerja

Berikut adalah ringkasan nilai Prosentase target kinerja yang diperoleh pada tahun 2023:

Tabel 2.2.1 Persentase Kinerja
Persentase Kinerja Petugas Administrasi Loket di Objek Wisata Rara Klakah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
Meningkatnya pelayanan kepemerintahan di Objek Wisata	1. Jumlah kebersihan objek wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten yang dijaga.	250 Hari	184 Hari	73,6%	
	2. Jumlah Keindahan objek wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten yang dijaga	250 Hari	184 Hari	73,6%	
	3. Jumlah keamanan objek wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten yang dijaga	250 Hari	184 Hari	73,6%	

2.3. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan membaik
- Target dan realisasi ditentukan dengan
- Persentase ditentukan dengan
- Lain-lain

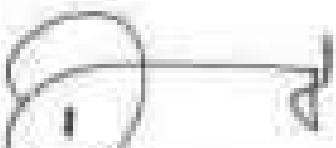
BAB II PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2023 dapat disampaikan secara ringkas bahwa dalam penyelesaian yang diperlukan, target kinerja tersebut berhasil diwujudkan dan dilaksanakan dengan baik.

Mengritas,
Abdon Langgung

Lumajang, 06 Oktober 2023

Pengawas Penanggung Jawab Kebersihan



ABDON DHARMA PUTRA, S.SIP
NIP. 19910128 210307 1 001



NIP. 19710112 199403 1 006

**LAPORAN KINERJA
JABATAN FUNGSIONAL UMUM
TRIBULAN III TAHUN 2023**

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja buku unit instansi pemerintah kepada masyarakat secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Laporan Kinerja ini disampaikan untuk mengevaluasi hasil kinerja di objek wisata terhadap pencapaian Prosantase Kinerja yang telah diperjanjian. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 ini disajikan kondisi keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian Prosantase Kinerja sebagai Petugas Pemungut Retribusi di Objek Wisata Water Park.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Petugas Pemungut Retribusi di objek wisata Water Park dengan Kepala Satuan Pengelolaan Destinasi Pariwisata posisi dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan target kinerja dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya pelayanan kepariwisataan.

1. Jumlah kebersihan objek wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten yang dijaga
2. Jumlah keindahan objek wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten yang dijaga
3. Jumlah laporan bulanan objek wisata yang harus dibuat

2.2. Prosantase Kinerja

Berikut adalah ringkasan atas Prosantase target kinerja yang diperoleh pada tahun 2023:

Tabel 2.2.1 Persentase Kinerja
Persentase Kinerja Sebagai Pelugus Pernunggu Retribusi
di Objek Wisata Water Park

Bantuan Kegiatan	Inisiatif Kinerja	Target	Realisasi	Persen- tase	Keterangan
Meningkatnya pelaksanaan kepariwisataan di Objek Wisata	1. Jumlah keberadaan objek wisata yang diakuisisi oleh pemerintah kabupaten yang dianggarkan 2. Jumlah keberadaan objek wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten yang dianggarkan 3. Jumlah laporan bulanan objek wisata yang harus dibuat	250 Hari	122 Hari	48,8%	
		250 Hari	122 Hari	48,8%	
		250 Hari	122 Hari	48,8%	

2.2. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
 - Laporan sudah baik
 - Laporan diperbaiki
 - Target dan realisasi ditempuhi dengan
 - Persentase ditempuhi dengan
 - Lam-lam
-
-
-

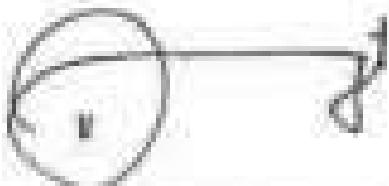
BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2023 dapat disimpulkan secara ringkas bahwa dalam persentase sasaran yang diperlukan, target kinerja tersebut berhasil dicapai dan dilaksanakan dengan baik.

Mengatahi,
Atasan Langsung

Lumajang, 06 Oktober 2023

Petugas Pemungut Rambuni



NICO DHARMA PUTRA, S.SiT
NIP. 19910128 210507 1 001



SUMINAH
NIP. 19651219 280701 2 009

**LAPORAN KINERJA
JABATAN FUNGSIONAL UMUM
TRIMULAN III TAHUN 2023**

BAB I PENDAHULUAN

Peningkatan kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melukut dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Laporan Kinerja ini disampaikan untuk mengevaluasi hasil kinerja di obyek wisata terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjian. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 ini disajikan kondisi keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja sebagai koordinator porir depan dan kebersihan kolam di obyek wisata Pemandian Alam Selokambang.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara koordinator porir depan dan kebersihan kolam di obyek wisata Pemandian Alam Selokambang dengan Kepala Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata adalah dengan menyatakan menjalankan akan mewujudkan target kinerja dengan sasaran singgahan yaitu meningkatnya pelayanan kepariwisataan.

1. Jumlah kebersihan obyek wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten yang diaga
2. Jumlah Penjagaan Porir obyek wisata Selokambang

2.2. Capaian Kinerja

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang diperoleh pada tahun 2023:

Tabel 2.2.1 Capaian Kinerja
Capaian Kinerja Sebagai Koordinator Porir Depan Dan Kebersihan Kolam
di Obyek Wisata Pemandian Alam Selokambang

Geseran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rentasai	Capaian	Kemarangan
Meningkatnya pelayanan kebersihan	1. Jumlah kebersihan obyek wisata yang dikelola baik	250 Hari	184 Hari	73.6%	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaiam	Keterangan
1. Objek Wisata	peningkatan keterserapan yang dijangka 2. Jumlah Penjagaan Pintu objek wisata Selokambang	250 Hari	184 Hari	73,6%	

2.3. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG,

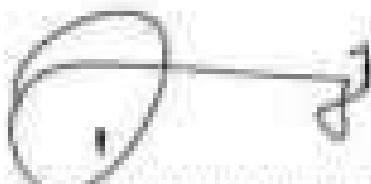
- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi dicapai siang
- Capaian dicapai siang
- Lain-lain

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2023 dapat disimpulkan secara ringkas bahwa dalam pencapaian sasaran yang diberjanjikan, target kinerja tersebut berhasil diwujudkan dan dilaksanakan dengan baik.

Mengatahi,
Atasnamai Langsung

Lamongan, 06 Oktober 2023,



BICKO DHARMA PUTRA, S.STP
NIP. 19910129 210507 1 001

Pelugas Penanggung Jawab Kebersihan



MOCH. YADI
NIP. 1983106 200601 1 005

**LAPORAN KINERJA
JABATAN FUNGSIONAL UMUM
TRIMESTER III TAHUN 2023**

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perlujuhan sikap yang akurasi terhadap kinerjanya. Laporan Kinerja ini disampaikan untuk mengevaluasi hasil kinerja di obyek wisata terhadap pencapaian Prosentase Kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 ini disajikan kondisi keberhasilan, misalnya ketidakberhasilan pencapaian Prosentase Kriteria sebagai petugas koordinator lapangan serta segoga tanu di Obyek Wisata Renu Klakah.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Dinas Administrasi di obyek wisata Renu Klakah dengan Kepala Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata adikah dengan menyatakan menjalankan akan mewujudkan target kinerja dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya pelayanan kepuasan pelanggan di obyek wisata meliputi:

1. Jumlah keberhasilan obyek wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten yang dijaga
2. Jumlah keindahan obyek wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten yang dijaga
3. Jumlah keamanan obyek wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten yang dijaga
4. Jumlah laporan bolanan obyek wisata yang harus dibuat

2.2. Prosentase Kinerja

Berikut adalah ringkasan nilai Prosentase Target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2023.

Tabel 2.2.1 Persentase Kinerja
Persentase Kinerja Sebagai Petugas Koordinator Lapangan Area Segitiga Ranu
di Objek Wisata Ranu Kumbolo

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisti	Persentase	Keterangan
Meningkatnya pengetahuan kepariwisataan di Objek Wisata	1. Jumlah keberadaan objek wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten yang dijaga	250 Hari	184 Hari	73,6%	
	2. Jumlah kendaraan objek wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten yang dijaga	250 Hari	184 Hari	73,6%	
	3. Jumlah kesadaran objek wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten yang dijaga	250 Hari	184 Hari	73,6%	
	4. Jumlah laporan bulanan objek wisata yang harus dilulus	250 Hari	184 Hari	73,6%	

2.3. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

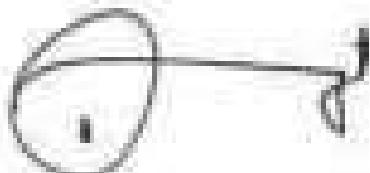


- Laporan bulanan baik
- Laporan sudah jadi
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi masih jang
- Persentase diatas jang
- Lain-lain

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2023 dapat diimpulkan secara ringkas bahwa dalam penyelesaian tugas-tugas yang diperjanjikan, target kinerja tersebut berhasil diwujudkan dan dilaksanakan dengan baik.

Mengatahi,
Atasnam Langsung



BICKO DHARMA PUTRA, S.Si, IP.
NIP. 19910126 210607 1 001

Lumajang, 09 Oktober 2023

Petugas Koordinator Lapangan



RAHMADHAN
NIP. 19700616 200701 1 021

LAPORAN KINERJA ESELON III
BIDANG DESTINASI PARIWISATA
Tribulan III Tahun 2023

RAB I
PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atuannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melokal dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk mengoptimalkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas Bidang Destinasi Pariwisata terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tribulan III Tahun 2023 ini disampaikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang Destinasi Pariwisata.

Bidang Destinasi Pariwisata merupakan salah satu bagian yang ada di Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 8 Tahun 2023 tentang penetapan SOTK dan Penjabaran Tugas, Pokok dan Fungi Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 8 Tahun 2023, Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program pengelolaan daya tarik destinasi pariwisata. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Destinasi Pariwisata menggunakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Destinasi;
- b. Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan bidang destinasi pariwisata;
- c. Pelaksanaan pengelolaan daya tarik wisata;
- d. pelaksanaan penyedia layanan jasa usaha pariwisata;
- e. pelaksanaan pengelolaan tujuan strategis pariwisata;
- f. pelaksanaan pengelolaan destinasi pariwisata;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan daya tarik destinasi pariwisata;
- h. penberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang harus diambil kepada Kepala Dinas Pariwisata;

4. perlindungan lingkungan yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata.

Sekalipun Organasi Banteng Destinasi Pariwisata terdiri dari beberapa Unit Kegiatan, diantaranya:

- a. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota;
- b. Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota;
- c. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota;
- d. Pengelolaan Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten/Kota;
- e. Pengelolaan Persekitaran Religiusitas Sosial dan Persepsi dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;
- f. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Wisata Kabupaten/Kota;
- g. Perbaikan Manajemen dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Kabupaten/Kota;
- h. Penyusunan Destinasi Pariwisata Berkualitas dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Kabupaten/Kota;
- i. Pembinaan dan Pengawasannya Unit Pariwisata.

Bidang Destinasi Pariwisata merupakan peran penting dalam mendukung keberhasilan suatu strategi. Di era Pariwisata Kabupaten Lumajang serta dalam rangka mendukung pencapaian tujuan akhirnya, yakni Akreditasi Institusi Pendidikan (SAKIP) berserta pencapaiannya. Dengan adanya hal itu maka Bidang Destinasi Pariwisata adalah salah satu dari empat (4) Prior Pariwisata dengan Inisiatif Pariwisata yang sekaligus dalam satu bidang Destinasi Pariwisata Kabupaten Lumajang dengan Satuan Jasa Usaha Pariwisata.

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 Perjupitan Kinerja

Sebagaimana Perjupitan Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Kepala Dinas Pariwisata dengan Kepala Balong Destinasi Pariwisata adalah dengan menyatakan menjalankan atau mencapai 1 (satu) Target Kinerja dengan 1 (satu) Sasaran Program yaitu Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata yang Memenuhi Kriteria 3A dengan indikator kinerja : Penurunan Daya Tarik Destinasi Wisata yang Memenuhi Kriteria 3A (Attraction, Accessibility, Amenities).

2.2 Capaian Kinerja

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang ditetapkan pada Triwulan III Tahun 2023.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama
Triwulan III Tahun 2023

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Raihan	Capaian
1	1	1	0	0%
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata yang Memenuhi Kriteria 3A	Penurunan Daya Tarik Destinasi Wisata yang Memenuhi Kriteria 3A	1 Daya Tarik Destinasi Wisata	0 Daya Tarik Destinasi Wisata	0%

Tabel 2.2
Catatan per outcome Balong Destinasi Pariwisata
Triwulan III Tahun 2023

No	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Raihan			Kinerja	Pihak
			Pagu	Raihan	Kapai		
1	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata yang Memenuhi Kriteria 3A	Penurunan Daya Tarik Destinasi Wisata yang Memenuhi Kriteria 3A				0	0
	Program : Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		3.000.000.000	3.000.000.000	100%	0	0

Tabel 2.3
Pagu Biaya Anggaran S/D Triwulan III Tahun 2022

Kegiatan / Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Anggaran			Biaya			Efisiensi (%)
		Pagu	Rincian	%	T	R	%	
Kegiatan: Kegiatan Pengembangan Tata Kelola Kerjasama / Kita Kegiatan: Pengembangan Strategi partisipasi Kabupaten / Kota	Jumlah BTW yang ditanggung dan Kegiatan Jumlah Komunitas Ketiga partisipasi kabupaten/kota yang diikuti	101.341.000	101.341.000	100,00	101 BTW	0	0	
Kegiatan: Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dituju	3.004.675,619	3.004.675,619	45,36	9 BTW	0	62,5	
Kegiatan: Monitoring dan evaluasi Pengembangan Strategi partisipasi Kabupaten / Kota	Jumlah lokasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	40.000.000	30.000.000	75	Dokumen	0	0	
Kegiatan: Pembinaan masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan masyarakat dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	41.879.000	30.356.000	61,96	Dokumen	0	50	
Kegiatan: Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata daerah Kabupaten / Kota	Jumlah TBM yang ditanggung	30.000.000	15.300.000	75	Dokumen	0	50	
Total Anggaran		1.075.197.620	1.074.317.000	100				

Berikut adalah rincian dari masing-masing instansi, sebagai berikut:

Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

1. Jumlah Sarana dan Prasarana Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Yang Termedia dan Terpelihara

Sarana dan Prasarana pariwisata yang linear merupakan salah satu indikator pertumbuhan pariwisata. Sarana/prasarana diartikan sebagai prasarana tempat berkumpul dari penduduk dan pengunjung hotel, restoran, tempat liburan dan sebagainya serta prasarana jalan dan transportasi yang linear dan terjangkau oleh

infrastruktur. Perekonomian (infrastructure) adalah unsur dasar yang dapat memungkinkan proses perekonomian berjalan dengan lancar sedangkan ruang terbangga dapat memudahkan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Sementara kepariwisataan (tourism infrastructure) adalah unsur dasar yang memungkinkan agar perekonomian berjalan dapat halus dan berkembang.

2.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan Analisis atas capaian target kinerja mengenai indikator-indikator kinerja terhadap tujuan strategis ini adalah sebagai berikut:

SASARAN PROGRAM :

A. Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata yang Memenuhi Kriteria 3A

Dalam rangka mendukung implementasi di Kabupaten Lamongan sebagai implementasi Rencana Pengembangan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan dan dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan yakni Visi " Terwujudnya Masyarakat Lamongan yang Berdaya Saing, Makmur, dan Bermartabat " sebagaimana disebutkan dalam "Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata". Destinasi Pariwisata adalah salah satu pilar dari 4 pilar Pembangunan Kepariwisataan yaitu Destinasi Wisata, Industri Pariwisata, Keterhubungan Pariwisata, dan Perumahan Pariwisata. Untuk itu dalam legislasinya Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas yang salah satunya adalah meningkatkan Daya Pariwisata dan adanya penetapan standar pada Industri Pariwisata. Sehingga dalam legislasinya bidang destinasi pariwisata berusaha untuk meningkatkan kualitas pada destinasi pariwisata untuk meningkatkan kualitas destinasi pariwisata tersebut indikator kinerja tersebut daya tarik destinasi wisata yang memenuhi kriteria 3A. Dengan anggaran Rp. 2.000.527.868 dan Triwulan III Tahun 2023 terrealisasi sebesar Rp. 1.596.004.759 dengan capaian 78,97 %. Berikut adalah urutan capaian dari masing-masing institusi, sebagai berikut:

A.1 Jumlah Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang memenuhi kriteria pada 3A (Attraction, Accessibility, Amenities)

a. Attraction (Daya Tarik)

Mempunyai komponen yang signifikan dalam menarik wisatawan baik dari dalam negeri maupun internasional yang memiliki minat terhadap destinasi

disembangkap menjadi sebuah strukti wisata. Area yang dibersangkap merupakan area wisata bukit yang dilalui modal atau mobil berperambatan. Dengan mempertahankan potensi berperambatan di suatu daerah harus berpedoman kepada area yang dilalui oleh wisatawan. Banyak strukti yang memiliki klasifikasi sebagai tiga tipe, yaitu 1) Natural Reserve (alami), 2) Strukti wisata bukti, dan 3) Strukti buatan manusia itu sendiri. Klasifikasi strukti bukti menjadi status serta matlamat wisatawan untuk mengunjungi suatu daerah tertentu wisata (UTW).

b. Accessibility (Aksesibilitas)

Aksesibilitas merupakan hal yang paling penting dalam kegiatan perjalanan. Segala macam transaksi ataupun jasa transportasi merupakan akhir penting dalam perjalanan. Di sisi lain akhir ini disebutkan dengan transfrabilitas, yaitu kemudahan untuk bergerak dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Jika suatu daerah tidak tersedia akomodasi yang baik seperti bandara, pelabuhan dan jalan raya, maka tidak akan ada wisatawan yang mempengaruhi perkembangan ekonomi di daerah tersebut. Jika suatu daerah memiliki potensi perjalanan, maka harus disediakan akomodasi yang memadai sehingga daerah tersebut dapat dikunjungi.

c. Amenity (Fasilitas)

Amenity atau amanities adalah segala macam sarana dan prasarana yang diperlukan oleh wisatawan selama berada di daerah tujuan wisata. Sarana dan prasarana yang dimaksud seperti penginapan, rumah makan, transportasi dan area perjalanan. Dengan menggunakan prasarana yang cocok dibangunlah sarana-sarana perjalanan seperti hotel, strukti wisata, marina, gedung pertunjukan, dan sebagainya. Adapun prasarana yang harus diperlukan untuk pengembangan sarana-sarana perjalanan adalah jalan raya, jembatan air, irigasi lahan, tempat pembangunan tembok, bandara, pelabuhan, telepon, dan lain-lain.

A.2. Perjenjilan Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dikang Destinasi Pariwisata, pada Tahun 2023 memiliki target sebagai berikut:

Tabel A.2.1
Perjenjilan Kinerja Dikang Destinasi Pariwisata Tahun 2023

Sasaran Program	Inidikator Kinerja	Target	Rendah
1	2	3	4
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata yang Memenuhi Kriteria 3A.	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata yang Memenuhi Kriteria 3A	1. Daya Tarik Destinasi Wisata	0. Daya Tarik Destinasi Wisata

Jumlah destinasi wisata yang memenuhi kriteria 3A pada tahun 2023 adalah 11 DTW. Berdasarkan rencana akta dikang Destinasi Pariwisata merupakan perjanjian kinerja dengan sasaran kategori meningkatnya daya tarik destinasi wisata yang memenuhi kriteria 3A dengan indikator kinerja peningkatan daya tarik destinasi wisata yang memenuhi kriteria 3A dengan capaian sasaran program terhadap pagu anggaran sebesar Rp. 2.000.527.868 dan Triwulan III Tahun 2023 berhasil sebesar Rp. 1.596.084.758 dengan capaian 78,97 %.

Tabel A.2.2
Pencairan Kinerja Dikang Destinasi Pariwisata
Triwulan III Tahun 2023

Sasaran Program	Inidikator Kinerja	Target	Rendah	Capaian (%)
1	2	3	4	5=4/3
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata yang Memenuhi Kriteria 3A	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata yang Memenuhi Kriteria 3A	1. Daya Tarik Destinasi Wisata	0. Daya Tarik Destinasi Wisata	78%

Berdasarkan Rencana Akta Dikang Destinasi Pariwisata pada Triwulan III:

Peningkatan daya tarik destinasi wisata yang memenuhi kriteria 3A, target sebesar Triwulan III tahun 2023 sebagaimana di Dikang Destinasi Wisata pada Triwulan III tahun 2023 berhasil sebesar 1 Daya Tarik Destinasi Wisata pada Triwulan III tahun 2023 berhasil sebesar 0 Daya Tarik Destinasi Wisata dengan capaian 0%. Kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan sasaran akibatnya. Sedangkan pagu anggaran Rp. 2.000.527.868 dan Triwulan III Tahun 2023 berhasil sebesar Rp. 1.596.084.758 dengan capaian 78,97 %.

A.2. Perencanaan Strategis

Berdasarkan perencanaan strategis kinerja tidak dicapai penerapan pada tahun 2023 mencapai target :

Penerapan dasar tata kelola yang memenuhi kriteria DA (Direction, Accountability, Accepting) dengan target sebesar 1 dasar tata kelola yang diperlukan untuk pengetahuan dasar tata kelola dan jasa suatu perusahaan, pengetahuan dasar penerapan dan pengetahuan kewajiban strategi penerapan dengan sebagian anggaran 78,97% pada Triwulan III.

B.4. Kinerja Tidak Lanjut

Adapun faktor-faktor pendukung dan rintangan bagi yang untuk mengoptimalkan kinerja yang memenuhi kriteria pada DA (Direction, Accountability, Accepting) sampai dengan Triwulan ke III, indikator kinerja kualitas dasar tata kelola yang diperlukan sebesar 78,97 %, Diharapkan kinerja kualitas dasar tata kelola bisa segera tercapai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

C. Tanggapan Atasan Langsung

- Laporan kerangka hukum
- Laporan sudah hukum
- Laporan diserahkan
- Terser dan realisasinya dilaksanakan
- Cepat dan efektif dilaksanakan
- Lain-lain

BALI III
PROVINSI

Laporan Kinerja pada Triwulan III Tahun 2023 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 01 Tahun 2021, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam perspektif sasaran yang ditetapkan, dari target sasaran program yang ditetapkan oleh dilaksanakan pada triwulan ketiga ini mencapai saat ini masih dalam tahap pelaksanaan dengan progres sudah tercapai 78,97 %.

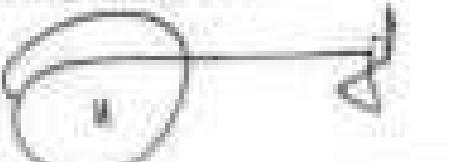
Mengakuai,
ATASAN LAMONG

KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN
LUMAJANG


YULIANAHMA WATI SE
NIP. 19690701 199602 2 002

Lumajang, 06 Oktober 2023

KEPALA BIDANG DESTINASI PARIWISATA


HEDYO DIARMA PUTRA, S.E.
NIP. 19910120 210507 1 001

**LAPORAN KINERJA PELAKUAT FUNGSIONAL
PENGELOLAHAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA**

Tributan III Tahun 2023

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pengelolaan kawasan strategis pariwisata merupakan kegiatan atau tugas yang dilakukan berdasarkan prinsip dan tujuan tertentu. Prinsip tersebut mencakup kewajiban yang melibatkan dan perwujudan nilai-nilai yang diorientasikan terhadap kinerjanya. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata bertujuan pencapaian kinerja yang telah diperjanjian. Dalam Laporan Kinerja Tributan III Tahun 2023 ini disajikan beberapa kondisi, hasil yang dicapai, pembahasan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata.

Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata merupakan salah satu Kegiatan yang ada pada Bidang Diklatasi Pariwisata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan yang dimulai berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang penubuhan SOTK dan Penjabaran Tugas, Pukok dan Pangsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 8 Tahun 2021, Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata;
- b. menyusun perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata;
- c. menyelesaikan pelaksanaan Kawasan Strategis Pariwisata;
- d. melaksanakan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata;
- e. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sumber dan prasarana dalam pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata;
- f. melaksanakan perbaikan dan penyiaran dalam pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata;
- g. melaksanakan pengembangan destinasi pariwisata berkualitas;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata;

- i. memberikan suara dan peringatan mengenai impak dan risiko yang terjadi di bawah kepala Kepala Bidang Desain Perwira;
- j. memberikan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Desain Perwira.

Pengelolaan Kawasan Strategis Perwira menjalankan tugas pokok dalam mendukung kinerja dan ketahanan ekonomi melalui pengembangan dan penerapan teknologi dan sistem informasi berorientasi pada peningkatan kinerja dan koordinasi antara instansi pemerintah dan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, Pengelolaan Kawasan Strategis Perwira bertujuan memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 Perjalanan Kinerja

Perkembangan Perjalanan Kinerja Tahun 2023 yang diimplementasikan antara Kepala Bidang Diktritnas Universitas dan Koordinatur Pengelolaan Kewenang Strategis Pemerintah adalah dengan menyelesaikan tumpukan akhir merupakan tujuan kegiatan yang memungkinkan pengelolaan kewenang strategis pemerintah berjalan efektif.

2.2 Capaian Kinerja

Berikut adalah ringkasan dari capaian target kinerja yang diwujudkan Tabelan III Tahun 2023

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Kegiatan Pengelolaan Kewenang Strategis Pemerintah
Tabelan III Tahun 2023

No	Sumber Kegiatan	Kindikator Kinerja	Target	Raihan	Capaian
1	Meningkatnya Pengelolaan Kewenang Strategi Pemerintah Kaliyakarta-Lata	Kunci 1 (Indikator Hasil Meningkatnya Penerapan Pengelolaan Kewenang Strategis Pemerintah Kaliyakarta-Lata)	1 Dikemas	0	0%

Tabel 2.2
Capaian Kinerja
Tabelan III Tahun 2023

No	Sumber Program	Indikator Kinerja	Anggaran Pendapatan dan Belanja			Lanjut			Pisaran
			Pendapatan	Belanja	%	Tujuan	Raihan	%	
1	Meningkatnya Rasio : Tinggi Dikemas : Wajar juga : Memenuhi Kriteria 3.A	Penerapan Rasio Tinggi Wajar Wajar Memenuhi Kriteria 3.b				1	0	0	
	Kinjor Penyelenggara Pengelolaan Kewenang Strategis Pemerintah		61.290.000	30.700.000	50,12				

2.3 Ringkasan Analisis Kinerja

Evaluasi dan Analisis atas capaian Target Kinerja manajemen institusi-institusi
Tinjauan terhadap sumber kinerjanya berada pada tahap pelaksanaan

SASARAN KEGIATAN
Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota

Raport meningkatkan pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten / kota, yaitu dengan adanya indikator kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang diamanalisa
2. Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang dikembangkan
3. Jumlah Kawasan pariwisata Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang terwujud
4. Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang dimonitoring dan dilaksanakan

Dengan anggaran Rp.64.250.000 pada Triwulan III Tahun 2023 terdiri dari Rp.30.750.000 dengan capaian 47,0%. Anggaran dan Realisasi terdiri terdiri dari:

Tabel 2.2
Pagu dan Realisasi Triwulan III Tahun 2023

No	Sumber Anggaran	Inisiatif/Divisi	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	T	R.	%	
1	Suh. Raport Meningkatkan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah Divisi dan Realisasi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	64.250.000	30.750.000	47,0%	1	9	0%	
	Raport. Pengelolaan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota		64.250.000	30.750.000	47,0%				

Berikut adalah urutan capaian dari masing-masing inisiatif, sebagai berikut:

Kesiapan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

I. Jumlah Unit Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

Dengan siklus kerja pelaksanaan di wilayah sejus dituntutkan monitoring dan evaluasi untuk dapat pengelolaan konsisten dan kordinasi teknis dari kerjasama yang sudah dilakukan oleh pemangku. Pada tahun 2023 sebagai besar kerjasama Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/kota ditetapkan pada wilayah KSPN, karena wilayah tersebut sebagai prioritas pengembangan pariwisata nasional. Program Monitoring dan Evaluasi

Pengelolahan Kewenang Strategis Pemerintah Kabupaten Kono dilakukan pada TA. 2023 oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dengan beberapa hal berupa upaya administrasi.

2.4 Rencana Tindak Lanjut

Pada Triwulan III tahun 2023 terdapat kegiatan yang dapat terlaksana berupa kegiatan rutin selain juga Administrasi tenaga kerja (yang pengerjakan berasar) untuk kegiatan yang belum selesai atau ditunda/tidak pada Triwulan sebelumnya sesuai dengan target yang masih ada di kajian pengelolahan kewenang strategis pariwisata.

2.5 Tingkatkan Akses Lingkungan

- Laporan kerangka baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realiasi dicapai sangat
- Capaian dicapai sangat
- Lain-lain

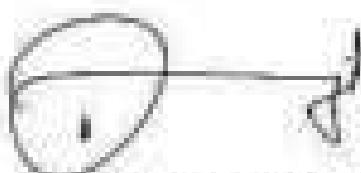
BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2023 dapat disampaikan secara singkat sebagai berikut:

1. Sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Daerah Lamongan Nomor 8 Tahun 2021.
2. Pencairan sesama kegiatan yang diperkirakan saat ini untuk pagu anggaran sebesar Rp. 61.350.000 dan tersisa sebesar Rp. 30.750.000 dari tersisa 20,12% dari sisa pagu anggaran.

Mingguan,
ATASAN LANGSUNG

Kepala Bidang Desain Pariwisata



KHOLIDUL ARIFIN PUTRA, S.Sos
NIP. 19910120 210507 1 001

Lamongan, 06 Oktober 2023

Adyakusumah Eko Prayitno dan Djayanti Kartini Aini
Nimba

TOMY ERSAWATI, S.Sos, M.M
NIP. 19770820 201101 2 004

**LAPORAN KINERJA
JABATAN FUNGSIONAL UMUM
TRIBULAN III TAHUN 2023**

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja bantu unit instansi pemerintah kepada masyarakat secara prinsip merupakan kewajiban yang telektif dan perwujudan nilai-nilai yang akumulatif terhadap kinerjanya. Laporan Kinerja ini disampaikan untuk menganalisis hasil kinerja masing-masing staf di Bidang Destinasi Pariwisata terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 ini disajikan kondisi keterhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja sebagai tenaga kerja bantuan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Urusan Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang. Bidang Destinasi Pariwisata memiliki 3 (tiga) seksi, yaitu : Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata, Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata dan Seksi Pengelolaan Daya Tantangan dan Jasa Usaha Pariwisata.

Penjabaran tugas dari Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata merupakan turunan tugas secara teknis dari Bidang Destinasi Pariwisata yang pelaksanaannya dilapangan dibantu oleh staf. Kinerja staf pada Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata harus sinergi dengan Kepala Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata dengan tujuan terpenuhinya target kinerja Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara petugas administrasi umum Bidang Desaines Pariwisata dengan Kepala Dinas Pengelolaan Desaines Pariwisata aduan dengan menyatakan menjalankan akan memudahkan target kinerja dengan susunan kegiatan yaitu meningkatnya ketersediaan data kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota.

1. Jumlah data kebutuhan barang di obyek wisata yang dikelola pemerintah kabupaten;
2. Jumlah pendistribusian kebutuhan barang di obyek wisata yang dikelola pemerintah kabupaten;
3. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan/penggunaan fasilitas pendukung pariwisata milik pemerintah kabupaten;
4. Jumlah kegiatan penyuluhan administrasi LKA.

2.2. Capaian Kinerja

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang diberikan pada tahun 2023:

Tabel 2.2.1 Capaian Kinerja
Capaian Kinerja Sebagai Petugas Administrasi Umum
di Bidang Desaines Pariwisata

Benturan Kegiatan	Indikator Kinerja	Tujuan	Realisasi	Capaian	Keterangan
Meningkatnya Ketersediaan Data Riegistrasi Pengelolaan Desaines Pariwisata Kabupaten/Kota	1. Jumlah data kebutuhan barang di obyek wisata yang dikelola pemerintah kabupaten	4 Obyek Wisata	4 Obyek Wisata	100%	
	2. Jumlah pendistribusian kebutuhan barang di obyek wisata yang dikelola pemerintah kabupaten	4 Obyek Wisata	4 Obyek Wisata	100%	
	3. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	1 Berkas	1 Berkas	100%	

Bentuk Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaiari	Keterangan
	pemanfaatan penggunaan fasilitas pendukung pemanfaatan milik pemilik Sabuputan				
4. Jumlah Kegiatan Penyusunan Administrasi LJK	3 Berkas	4 Berkas	75%		

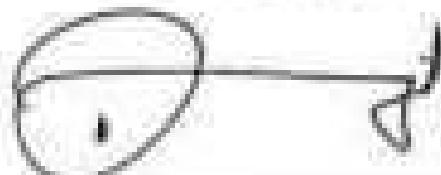
2.3. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan luning baik.
 - Laporan sudah baik.
 - Laporan diperbaiki.
 - Target dan realisasi ditetapkan yang
 - Capaian ditetapkan yang
 - Lain-lain
-
-
-

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2023 dapat disimpulkan secara ringkas bahwa dalam pencapaian sasaran yang diperlukan, target kinerja tersebut berhasil diwujudkan dan dilaksanakan dengan baik.

Mengelakui,
Atasan Langsung



RICKO DIARMA PUTRA, S.T.
NIP. 19910120 210507 1 001

Limejeng, 06 Oktober 2023

Tenaga Administrasi



KABATI
NIP. 19711115 200701 2 014

**LAPORAN KINERJA
JABATAN FUNGSIONAL UMUM
TRIMESTER III TAHUN 2023**

BAB I PENDAHULUAN

Peranggungjalan kinerja suatu unit bisnis pemerintah kecada atauannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melatar dan perwujudan ikap yang diuntai terhadap kinerjanya. Laporan Kinerja ini disampaikan untuk mengevaluasi hasil kinerja di obyek wisata terhadap pencapaian Prosentase kinerja yang telah diperjanjian. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 ini disajikan kondisi keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian Prosentase kinerja sebagai petugas Koordinator Objek di Obyek Wisata Water Park.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara petugas Koordinator Objek di Obyek Wisata Water Park dengan Kepala Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata adalah dengan menyatakan menjalankan akan mewujudkan target kinerja dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya pelayanan kependidikan di obyek wisata meliputi :

1. Jumlah kebersihan obyek wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten yang diaga
2. Jumlah keindahan obyek wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten yang diaga
3. Jumlah keamanan obyek wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten yang diaga

2.2. Prosentase Kinerja

Berikut adalah ringkasan atas Prosentase target kinerja yang dicasikan pada tahun 2023:

Tabel 2.2.1 Persentase Kinerja
Persentase Kinerja Sebagai Koordinator Objek
di Objek Wisata Water Park

Objek Kegiatan	Indikator Kinerja	Tarif	Realisasi	Persentase	Keterangan
Meningkatnya pelajuaran keamanan di objek wisata	1. Jumlah keberadaan objek wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten yang dijaga 2. Jumlah keberadaan objek wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten yang dijaga 3. Jumlah keamanan objek wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten yang dijaga	250 Hari	184 Hari	73,6%	
		250 Hari	184 Hari	73,6%	
		250 Hari	184 Hari	73,6%	

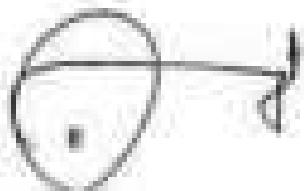
2.3. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realensi diambil uang
- Persentase diambil uang
- Lain-lain _____

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2023 dapat disampaikan secara ringkas bahwa dalam penyelesaian tugas yang diperlukan, target kinerja tersebut berhasil dimajukan dan dilaksanakan dengan baik.

Menghormati,
Atasan Langsung



RIKO DHARMA PUTRA, S.SIP
NIP. 19910128 210507 1 001

Lumajang, 06 Oktober 2023

Koordinator Objek Waktu



BUDI
NIP. 19730403 201001 1 001

**LAPORAN PEJABAT FUNGSIONAL
PENGELAHAN DESTINASI PARIWISATA
Triwulan III Tahun 2023**

**BAB I
PENUTUPAN**

Pertanggungjawaban kinerja ini akan menunjukkan penilaian kepada masyarakat, secara prinsip merupakan kewajiban yang melahirkan perwujudan nilai-nilai yang diamanahkan oleh negara. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengakomodir tali-tali yang bersifatnya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengakomodir tali-tali yang bersifatnya. Kegiatan Pengelahan Destinasi Pariwisata tetap berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan Kinerja Kegiatan Triwulan III Tahun 2023 ini disampaikan beberapa hal-hal, diantaranya: Kegiatan Pengelahan Destinasi Pariwisata berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan Pengelahan Destinasi Pariwisata tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang ada pada Diklat Destinasi Pariwisata di Dinas Pariwisata Kabupaten Lamongan yang ditetapkan pada Peraturan Bupati Lamongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kadisbukac, Sistem Kinerja Destinasi Pariwisata, Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Cara Dinas Pariwisata.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 8 Tahun 2021, Kegiatan Pengelahan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja seksi pengelahan destinasi;
- b. Menyusun peraturan destinasi pariwisata;
- c. Menyusun perencanaan destinasi pariwisata;
- d. Melaksanakan pengembangan destinasi pariwisata;
- e. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan secara dan prakarsa dalam pengelahan destinasi pariwisata;
- f. Melaksanakan pembentukan masyarakat dalam pengelahan destinasi pariwisata;
- g. Melaksanakan perbaikan destinasi pariwisata berkelanjutan;
- h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan perjalanan destinasi pariwisata;
- i. Memberikan tuntuan dan perintahannya terhadap tanggung jawab dan struktural yang harus diambil kepada Kepala Bidang Destinasi Pariwisata;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Destinasi Pariwisata.

Kepala Pengelolaan Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tugas penting dalam mendukung keberhasilan suatu strategi Dinas Pemerintah dan Kebudayaan Kabupaten Letting serta dalam mengkoordinasikan proses persiapan penyelenggaraan Sistem Akademik Tingkat Intern bersertifikasinya Pemerintah (SATIP).

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 Perjanjian Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang diselenggarakan antara Kepala Bidang Destinasi Pariwisata dan Koordinator Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata adalah dengan menyatakan perjanjian akan menjadikan suatu kegiatan untuk meningkatnya destinasi pariwisata yang dikelola.

2.2 Capaian Kinerja

Berikut adalah ringkasan atau capaian-target kinerja yang dibentuk pada Tributan III Tahun 2023:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata
Tributan III Tahun 2023

Sifat Kegiatan	Bentuk Kinerja	Target	Realisa	Capai
Sif Kegiatan : Pengelolaan Pemantauan dan Evaluasi dalam Supra dan Program dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sensus dan Penetapan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Terwujud dan Terapkan	1 lensa	0	0 %
Sif Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Data Turis Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	0 %
Sif Kegiatan : Penyelidikan Masayarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan Masayarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4 Laporan	0	0 %
Sif Kegiatan : Penyampaikan Berita/Info Berkesan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Mengalami Destinasi Pariwisata Berkesan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 lokasi	0	0 %

Tabel 2.2
Catatan Anggaran
Tributan III Tahun 2023

No.	Satuan Program	Inisiatif Kategori	Anggaran			Rencana	Pihak	
			Prop	Rahmat	%			
1	Meningkatnya Daya Tarik Objek Wisata Kecamatan Krembung TA	Peningkatan Daya Tarik Objek Wisata yang Menarik di Kecamatan Krembung TA				1	R	0
	Anggaran : Peningkatan Penyelenggaraan Destinasi Pariwisata Kecamatan / Kina		3.761.096,928	1.912.967,000	50,86%			

2.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Kegiatan pada Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota TA. 2023 terfokus pada peningkatan destinasi pariwisata yang terintegrasi. Evaluasi dan analisis atas capaian target kewajiban masing-masing jukungan kinerja terhadap sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN: DESTINASI PARIWISATA YANG DIKELOLA

Kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota yang dikelola terdiri dari 4A, yaitu:

1. Akses meliputi airum, bandara, laut dan jalan
2. Akses meliputi infrastruktur transportasi dan infrastruktur informasi
3. Amanitas meliputi semua sektor, fasilitas umum, fasilitas pemukiman, investasi. Keterwaduhan amanitas sebagai sektor penerusang pariwisata merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan pengembangan destinasi pariwisata
4. Daya tarik objek wisata. Contoh fasilitas pendukung pariwisata yaitu rumah makan, air bersih, tempat parkir, toilet, dan lain-lain.
5. Ancillary meliputi lembaga pengelola destinasi objek. Lembaga tersebut akan menjadi bermanfaat bagi wisatawan karena mereka akan di mudahkan dengan berbagai layanan seperti informasi, komunikasi, dan berbagai layanan lainnya.

Dengan anggaran Rp. 3.761.096,928 pada Tributan III Tahun 2023 tercapai Rp. 1.912.967,000 dengan capaian 50,86%. Anggaran dan Realisasi sebagaimana tersebut tunduk dan

Tabel 3.3
Pagu dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Klasifikasi Kegiatan	Indikator Kewajiban	Anggaran			Kewajiban			Dilanjutkan
		Pagu	Rencana	%	T	R.	%	
Sub Kegiatan : Pengelolaan destinasi dan kualitas Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	3.303.000.928	1.493.112.000	45,3%	2	0	0	
Bnf Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dega Tari, Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	40.000.000	39.600.000	99%	1	0	0	
Sub Kegiatan : Pemasaran, Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemasaran Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	415.240.000	381.235.000	92,2%	0	0	0	
Sub Kegiatan : Pengoperasian Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi jaring Manajemen Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	
Total Anggaran I		3.761.2006.928	1.812.747.000	48,9%				

Berikut adalah urutan capaian dari masing-masing indikator, sebagai berikut:

Kesiguranan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

1. Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara

Sarana dan prasarana pariwisata yang lancar merupakan salah satu indikator perkembangan pariwisata. Sarana/prasarana diartikan sebagai proses tanpa hambatan dari pengadaan dan peningkatan hotel, restoran, tempat liburan dan sebagainya serta perbaikan jalur dan transportasi yang lancar dan terjangkau oleh wisatawan. Prasarana (infrastructure) adalah semua fasilitas yang dapat memungkinkan proses perjalanan berjalan dengan lancar seiring berkembangnya, sehingga dapat memudahkan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Sarana dan prasarana (tourism infrastructure) adalah semua fasilitas yang

memungkinkan agar promosi kepariwisataan dapat hidup dan berkembang serta dapat memberikan pengaruh pada winautor untuk memenuhi kebutuhan mereka yang beraneka ragam. Sementara itu merupakan keterkaitan antara tujuan wisata yang diperlukan untuk melanjutkan kebutuhan wisatawan dalam memenuhi perjalanan wisatanya.

Danah Kabupaten Lamongan dan pengembangan infrastruktur / fasilitas pariwisata destinasi pariwisata.

Tabel 2.4

Obyek Wisata yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah

No	NAMA OBJEK WISATA	DESA
1	P.A. SRI TEGAMAHAMU	PERAWANGAN
2	WATER PARK	KEDUNGWAJANG
3	TRAMPOLIN BLAKAOI DAN RAVU PALEO	TEGAL RANDU DAN KARL PALEO
4	RUMAH ARENA DAN HUTAN	AKTARAKA

2. Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Destinasi Pariwisata Kabupaten Lamongan yang sudah diresmikan akan menjadi salah satu sumber daya dan kesejahteraan untuk pengembangan yang terencana dan berkesempatan bagi daya tarik serta sumber daya alam maupun manusia juga berpotensi sebagai peningkatkan dan pengembangan destinasi prioritas. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai kegiatan pengawasan dari kegiatan penyebarluasan pengembangan destinasi pariwisata kabupaten sehingga lebih mudah dalam hal pengaruh dan ukurannya serta sejalan dengan pengembangan destinasi pariwisata nasional.

3. jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota merupakan suatu sub-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyampaikan dan memperbaiki kesiapan masyarakat secara aktif dan berdasarkan prinsip-prinsip kesadaran sosial. Peran pelaku masyarakat pada destinasi pariwisata memfasilitasi beberapa pekerjaan dan peningkatan kapasitas sebagai pengembangan manajemen pengelolaan destinasi yang di buatkan Destinasi Pariwisata yang di ketahui. Dengan adanya Number daya yang optimal akan meningkatkan tipe kelelahan dan daya yang bagi

Destinasi Pariwisata. Pengelola juga diwajibkan untuk berinovasi dan kreatif dalam meningkatkan kenyamanan wisatawan selain dilengkapi oleh Pemerintah Daerah melalui kerjasama pengolahan banting milik daerah sebagai destinasi pariwisata yang berjalan untuk memfasilitasi meningkatkan nilai ekonomi dari sektor pariwisata. Tujuan pembinaan dan pengembangan ini harus memberikan manfaat bagi masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi pembinaan dan pengembangan ini harus dilakukan agar dapat menciptakan kelebihan mereka menjadi lebih baik. Perencanaan dalam kegiatan pembinaan ini harus bisa mengusahakan mereka untuk mempunyai kesempatan mengakses sumber-sumber ekonomi. Salah satu cara yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada usaha pariwisata adalah dengan cara harus dort serta berpartisipasi dan berperan aktif dalam menentukan destinasi pariwisata pada wilayah yang ditengah.

4. Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelaanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Penerapan destinasi pariwisata berkelaanjutan merupakan konsep bersejata yang memberikan dampak terhadap lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi. Pengelolaan sebuah destinasi pariwisata harus memperkuat pada penerapan pada makroebola turisme karena hal ini akan berdampak secara langsung pada kelastaran lingkungan. Pemerintah Daerah bisa mertharta dalam penentuan aturan/ regulasi penempatan sebuah destinasi pariwisata yang berkelanjutan sehingga pengembangan pariwisata di masa yang akan datang akan lebih mengoptimalkan pada kelastaran lingkungan.

2.4 Rencana Tindak Lanjut

Sekti Pengelolaan Destinasi Pariwisata menyatakan Kisi-kisi ini memiliki Tujuan, Pokok, dan Fungsi yang ada dalam Rancangan Desainan Pariwisata.

2.5 Tanggapan Atasan Langsung

- Laporan lucu/hilang
- Laporan sudah hilang
- Laporan diperbaiki
- Tanda dan catatan ditulis ulang
- Catatan ditulis ulang
- Lain-lain

BAGIAN
PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2023 dapat diungkapkan dalam tiga hal sebagai berikut:

1. Seoarang unsur pelaksanaan bagi pokok dan fungsi Seksi Kepatuhan Kepatuhan Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 8 Tahun 2021, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan dari 4 (empat) sasaran yang ditetapkan dengan 1 (satu) unsur kegiatan salah satu perihal dilengkapi dengan hasil.

Mingguan
ATASAH LANGSTING

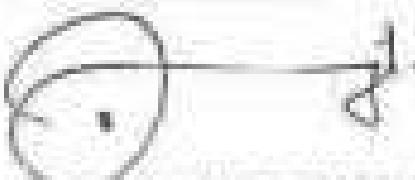
Lumajang, 06 Oktober 2023

KEPALA BIDANG DESENTRALISASI PARIWISATA



HEDY DHARMAJITRA, S.SIP
NIP. 19910128 210507 1 001

KOORDINATOR



HEDY DHARMA PUTRA, S.SIP
NIP. 19910128 210507 1 001

**LAPORAN KINERJA
JABATAN FUNGSIONAL UMUM
TRIMULAN III TAHUN 2023**

BAB I PENDAHULUAN

Perbaikan pengelolaan kinerja suatu unit kerja pemerintah Republik Indonesia secara prinsip merupakan kewajiban yang melahirkan dan perwujudan tata kelola yang akuntabel berdasarkan kinerjanya. Laporan Kinerja ini disampaikan untuk mengevaluasi hasil kinerja di bawah wewenang terhadap pencapaian Prosentase kinerja yang telah ditetapkan. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 ini disajikan kondisi keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian Prosentase kinerja sebagai petugas administrasi loket di Objek Wisata Renu Paku.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara petugas administrasi loket di Objek Wisata Renu Paku dengan Republik Suku Penghulu Desa: Parituhulu adalah dengan menyatakan menjalankan akan mewujudkan target kinerja dengan sasaran Anggaran pertama mengikuti pelaksanaan kepartisipasian di objek wisata meliputi:

1. Jumlah keberhasilan objek wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten yang dijaga
2. Jumlah keberhasilan objek wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten yang dijaga
3. Jumlah keberhasilan objek wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten yang dijaga

2.2. Prosentase Kinerja

Berikut adalah ringkasan atas Prosentase target kinerja yang ditentukan pada tahun 2023:

Tabel 2.2.1 Prosentase Kinerja

Percetase Kinerja Petugas Administrasi Loket di Objek Wisata Ratu Pakis

Benturan Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	REALISASI	PERSENTRAGE	KETERANGAN
Meningkatnya pelayanan keamanan di Objek Wisata	1. Jumlah keberadaan objek wisata yang diketahui oleh pemerintah kabupaten yang dijaga	250 Hari	184 Hari	73,6%	
	2. Jumlah keberadaan objek wisata yang diketahui oleh pemerintah kabupaten yang dijaga	250 Hari	184 Hari	73,6%	
	3. Jumlah keamanan objek wisata yang diketahui oleh pemerintah kabupaten yang dijaga	250 Hari	184 Hari	73,6%	

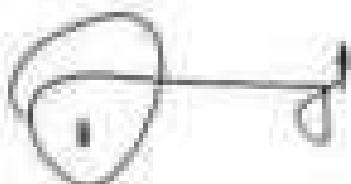
2.3. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan superb
- Target dan realisasi dilihat ulang
- Prosentase dilihat ulang
- Lain-lain

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2023 dapat disimpulkan secara ringkas bahwa dalam penilaian kesesuaian yang diperlakukan, target kinerja tersebut berhasil diwujudkan dan dilaksanakan dengan baik.

Mengetahui,
Asisten Langsung



ECHO DHARMA PUTRA, S.SIP
NIP. 19910128 210507 1 001

Lumajang, 08 Oktober 2023

Pelugas Administrasi Loket



MAT YASIN
NIP. 19710206 200701 1 012

**LAPORAN KINERJA
JABATAN FUNGSIONAL UMUM
TRIMESTER III TAHUN 2023**

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada publiknya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan akhir yang diuntuk terhadap kinerjanya. Laporan Kinerja ini disampaikan untuk akhir yang diuntuk terhadap kinerjanya. Laporan Kinerja ini disampaikan untuk mengevaluasi hasil kinerja di obyek wisata terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 ini disajikan kondisi keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja sebagai koordinator parik di Obyek Wisata Pemandian Alam Selokambang.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang disandang dengan antara pengelola koordinator parik di obyek wisata Pemandian Alam Selokambang dengan Kepala Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata adalah dengan menyatakan menjanjikan akan mencapai target kinerja dengan sifatnya kegiatan yaitu meningkatnya pola pikir kepemimpinan.

1. Jumlah keberhasilan obyek wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten yang diaga
2. Jumlah kendahian obyek wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten yang diaga
3. Jumlah kesanaman obyek wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten yang diaga

2.2. Capaian Kinerja

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang diperoleh pada tahun 2023.

Tabel 2.2.1 Capaian Kinerja
Capaian Kinerja Sebagai Koordinator Pantur
di Objek Wisata Pemandian Alam Sidoarjo

Batasan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Prestasi	Capaian	Ket.
Meningkatnya polibyanan kepariwisataan di Objek Wisata	1. Jumlah keberikan objek wisata yang dikunjungi oleh pemilik kabupaten yang dijaga 2. Jumlah kendaraan objek wisata yang dikunjungi oleh pemilik kabupaten yang dijaga 3. Jumlah keramahan objek wisata yang diberikan oleh pemilik kabupaten yang dijaga	250 Hari	184 Hari	73,6%	
		250 Hari	184 Hari	73,6%	
		250 Hari	184 Hari	73,6%	

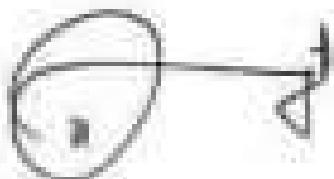
2.3. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diberi penghargaan
- Capaian diberi penghargaan
- Lain-lain

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2023 dapat disimpulkan secara ringkas bahwa dalam pencapaian sasaran yang diperlukan, target kinerja tersebut berhasil diwujudkan dan dilaksanakan dengan baik.

Mengelakui,
Alamat: Langsung



BAMBANG DHARMA PUTRA, S.STP
NIP. 19910128 210507 1 001

Lumajang, 08 Oktober 2023

Penanggung Jawab Pemerintah



NURUDIN
NIP. 19710601 220701 1 017

**LAPORAN KINERJA KEGIATAN III
PENGELOLAHAN DAYA TAKIR WISATA DAN JASA USHAHADA PARIWISATA
Tributan III Tahun 2023**

**MAB.I
PENDAHULUAN**

Pertanggung jawaban kinerja suatu unit antara perencanaan kepada strukturnya, secara prinsip merupakan kewajiban yang mutlak dan perangkat wajib yang akurat selalu terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini diwajibkan, selain untuk memperbaiki atau hal-hal yang perlu diperbaiki, juga untuk mengoptimalkan efisiensi, efektivitas, dan akurasi dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Daya Taktik Wisata Dan Jasa Usaha Pariwisata terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Dalam Laporan Kinerja Tributan III Tahun 2023 ini diungkapkan beberapa kondisi baik yang menggariskan ketercapaian mencapai ketidakberhasilan pencapaian kinerja Koordinator Kegiatan Pengelolaan Daya Taktik Wisata dan Jasa Usaha Pariwisata.

Kegiatan Pengelolaan Daya Taktik Wisata Dan Jasa Usaha Pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang ada pada Bidang Dinas Pariwisata di Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 08 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Kewenang Organisasi, Union Tugas Dasar Fungsi Serta Tujuan Kerja Dinas Pariwisata.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 8 Tahun 2021 Kegiatan Pengelolaan Daya Taktik Wisata dan Jasa Usaha Pariwisata mencantumkan tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Pengelolaan Daya Taktik Wisata dan Jasa Usaha;
- b. Menyusun perstapan daya taktik wisata;
- c. Menyusun rencana pengembangan daya taktik wisata;
- d. Melaksanakan pengembangan daya taktik wisata;
- e. Menyusun standarisasi jasa usaha pariwisata;
- f. Memberikan bantuan teknis dan administrasi jasa usaha;
- g. Fasilitasi investasi pariwisata;
- h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan daya taktik wisata dan jasa usaha;
- i. Memberikan arahan dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang harus diambil kepada Kepala Bidang Dinas Pariwisata.

- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Destinasi Pariwisata.

Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan Jasa Usaha Pariwisata merupakan hal penting dalam mendukung ketercapaian sasaran strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Lamongan serta dalam mengoptimalkan proses peningkatan perekonomian di sektor Akurtilititas Karya Tantoni beserta pencahayaannya (Pemerintah DKI Jakarta).

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 Perjanjian Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang diandatangani antara Kepala Bidang Destinasi Pariwisata dengan Koordinator Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan Jasa Usaha Pariwisata adalah dengan menyatakan dan menjanjikan akan mewujudkan Sasaran kegiatan yaitu Meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik wisata Kabupaten / Kota dan Jasa Usaha Pariwisata (JUP).

2.2 Capaian Kinerja

Berikut adalah rangkuman atau capaian target kinerja yang dicanangkan pada Triwulan III, tahun 2023:

Tabel 2.2.1
Capaian Kinerja Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan Jasa Usaha Pariwisata
Triwulan III Tahun 2023

Bentuk Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rendah	Capai
Meningkatnya Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Loker Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Klasifikasi, Reklamasi, Pembangunan, Revitalisasi)	1 DTW	0	0 %
Meningkatnya Potensial Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1	100 %
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebutuhan dan Perangkat Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	0 %
Meningkatnya Pengetahuan Teknis Diklat Usaha Pariwisata di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penilaian dan Pengawas Usaha Pariwisata	25 Laporan	0	0 %

Tabel 3.3
Fisik per output:
Triwulan III Tahun 2023

No	Nama/Proyek	Indikator Kinerja	Tujuan	Anggaran Biaya	%	Klasifikasi			Sumber
						T	R	S	
3	Meningkatnya Daya Tarik Wisata yang Memenuhi Kriteria Na.	Peningkatan Daya Tarik Wisata yang Memenuhi Kriteria Na.				0	0	0	
	Program Pengembangan Daya Tarik Desa dan Pariwisata		Rp. 341.000	Rp. 339.000	99%				

2.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan Analisis atas capaian target kinerja masing-masing indikator-indikator kinerja terhadap sasaran pada kegiatan pengelolaan daya tarik wisata dan Jasa Usaha Pariwisata secara umum mengalami Perubahan Anggaran Kegiatan pada triwulan III Kegiatan pada Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan Jasa Usaha Pariwisata TA. 2023.

SASARAN KEGIATAN:
Meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan Jasa Usaha Pariwisata
Kabupaten / Kota

Sejalan dengan perkembangan industri pariwisata di Indonesia dan dunia pada umumnya, jasa usaha pariwisata di Kabupaten Lumajang juga telah menunjukkan perkembangan yang signifikan sejak Desa Wisata selesai pada 21 Desember tahun 2014 lalu melalui Peraturan Bupati Lumajang No. 74 Tahun 2014 tentang Peretapan Desa Wisata Sari Kecamatan Sari Desa Wisata. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki paradigma baru bahwa jasa usaha pariwisata bisa dijadikan sebagai sektor yang dapat menyokong perekonomian masyarakat. Tambahnya para pelaku jasa usaha pariwisata merupakan hal yang positif dan berasal dari meyakinkan dalam mendukung pengembangan kepariwisataan khasanya di Kabupaten Lumajang. Dengan anggaran Rp. 294.600.000 pada Triwulan III Tahun 2023 tersisa Rp. 40.590.000 dengan rincian 29.61%, Anggaran dan Realisasi sepanjang tersbut terdiri dari :

Tabel 2.2.
Pagu dan Kreditur Tributan III Tahun 2023

Sumber Kegiatan	Inisiatif Desa	Pagu	Anggaran Realisasi	%	Kewajiban			Pihak
					T	R	N	
Sdi Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	10.000.000	1.000.000	10	1	0	0	
Sdi Kegiatan Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perintah	100.000.000	100.000.000	100	1	1	100	
Sdi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Balasan dan Pengeluaran Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	31.341.000	10.000.000	32	1	0	0	
Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		100.341.000	100.000.000	100				
Sdi Kegiatan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Hukum Pendidikan dan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	20.400.000	10.000.000	50	22	0	0	
Kegiatan Penitipan Tanah Bukan Bahan Bakar Jarak Jauh Kabupaten/Kota		20.400.000	10.000.000	50				
Total Anggaran :		300.741.000	100.000.000	33				

Berikut adalah analisis risiko dari triwulan-tujuh pada tahun 2023, sebagai berikut:

Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata dan Jasa Fisika Perimbau Kabupaten/Kota

I. Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

Daya Tarik Wisata dijadikan sebagai angka resmi yang memiliki kemanakan, ketepuhan, dan nilai yang berupa kesekutuan/kelakuan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjalani sejarah atau budayanya sendiri. Syarat-syarat Untuk Diterima Daya Tarik Wisata a) Wajib 10 s.d. 15 kategori tersebut harus ada objek dan struktur wisata yang berbeda dengan yang dimiliki daerah lain. Demikian kata lain diterima karena memiliki daya tarik manusia dan ciptaan budaya yang dapat dipadukan "entertainment" bagi wisatawan. What is not acilpati permasalahan alam, kegiatan,

konservasi dan struktur wisata. Makauhaya adalah sumber yang memerlukan untuk dilihat di What to do. Di tempat tersebut jadi tujuan yang dapat dilihat dan diakseskan, harus disediakan fasilitas rekreasi yang dapat memudahkan wisatawan tetapi tinggal lama di tempat ini. Makauhaya adalah sumber aktivitas yang dapat dilakukan di tempat ini; c) What to buy. Tempat tujuan wisata harus memiliki fasilitas untuk berbelanja terutama barang souvenir dan kebutuhan pokok sebagai salah-salah satunya di bantuan peluang ke tempat ini di What to arrived. Di dalamnya termasuk aksesori, bagaimana kita menggunakan daya bukti wisata tersebut, kendaraan apa yang akan digunakan dan bepergian mana tidak ketemu tujuan wisata tersebut. c) What to stay. Bagaimana sejauh mana akan tinggal untuk sementara selama dia berlibur. Diperlukan pengembangan penginapan baik hotel bintang atau hotel non bintang dan sebagainya.

2. Jumlah Persebaran Pengembangan Daya Tantik Wisata

Persebaran pengembangan Daya Tantik Wisata Kabupaten/Kota yang sudah ditriggernya untuk dipertahankan bisa terhadap masing kabupaten/kota atau masing-masing Daya Tantik Wisata yang sudah memiliki konsep keru guna sanggup mendukung dalam menciptakan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian perwira berpengaruh.

Benteng pengembangan mengacu pada 3A yaitu :

- a. Akses meliputi alam, budaya dan histori.
- b. Akses meliputi infrastruktur transportasi dan infrastruktur informasi.
- c. Akses meliputi sumber air, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, objek wisata. Ketersediaan sumberdaya sebagai sumber peningkatan perwira merupakan salah satu faktor pendukung ketahanan pengembangan daya tantik wisata, contoh fasilitas pendukung pariwisata yaitu : rumah makan, air bersih, tempat parkir, toilet dan lain-lain.

3. Monitoring dan evaluasi pengembangan Daya Tantik Wisata

Daya Tantik Wisata dipelajari sebagai segala sumber yang memiliki karakter, konservasi, dan nilai yang terwujud keseksamaan kelangsungan alam, budaya, dan hasil bukti manusia yang menjadi sumber atau tujuan wisatawan. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Daya Tantik Wisata Kabupaten/Kota difokuskan pada wilayah ESDM, karena wilayah tersebut sebagai prioritas pengembangan perwira nasional.

4. Jumlah Pembiayaan dan Pengembangan Untuk Pariwisata

Durat Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagai kawedang vector dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Lamongan memiliki peran dan andil dalam memberikan dan mengawasi pelaku jasa wisata pariwisata yang sebagian besar

Berawal dari sektor swasta / masyarakat mengingat banyak masyarakat pedesaan juga masih pemilik di Kabupaten Lamongan belum memiliki Tanda Daftar Daftar Pemilikan (TDP) diganti dengan NIK. Diungkap ini dalam upaya peningkatan kapasitas pedesaan jadi unit pariwisata dalam menyajikan wisatawan maka mereka sangat perlu untuk dikhawatir. Sehingga pada akhirnya berdampak pada peningkatan kenyamanan wisatawan di Kabupaten Lamongan. Berikut dengan hal tersebut di atas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah melakukan kegiatan peningkatan pedesaan jadi unit pariwisata di Kabupaten Lamongan dengan sasaran 13 Bidang Jasa Usaha Pariwisata yaitu sebagai berikut:

- 1) Daya Tarik Wisata;
- 2) Kawasan Pariwisata;
- 3) Jasa Transportasi Wisata;
- 4) Jasa Penginapan Wisata;
- 5) Jasa Makanan Dan Minuman;
- 6) Penyediaan Akomodasi;
- 7) Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi;
- 8) Penyelenggaraan Pertunjukan, Perjalanan Incentif, Kompleksasi, Dan Pameran;
- 9) Jasa Informasi Pariwisata;
- 10) Jasa Kehutanan Pariwisata;
- 11) Jasa Prajuwita;
- 12) Wisata Turis;
- 13) Spa.

2.4 Rencana Tindak Lanjut

Selain daya tarik wisata sebagai sumber wisatawan untuk berkunjung baik sendiri, kelompok dan atau keluarga difasilitasi seperti dan pertama untuk kebutuhan wisatawan yang berkunjung dan bisa menetap dalam suatu kawasan yang menjadi destinasi (daerah tujuan) wisata yang berdaya saing dengan memperkenalkan potensi masing-masing daya tarik wisata Kabupaten/Kota yang dimiliki dari masing-masing daya tarik wisata Kabupaten/Kota, untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan akan melakukan penetapan dan rencana pengembangan dengan menjaga karakteristik lokal dengan mempertahankan daerah resapan yang dapatnya memadai dalam pemanfaatan/konduktifitas misal kerja antar pemilik tanah dan pengelola daya tarik wisata.

Sekar jené wulu perwataan hargéne penting dalam meningkatkan kewaspadaan di Kabupaten Lumajang. Untuk meningkatkan daya saing pihak wulu jené perwataan jené ikuwu perwataan di Kabupaten Lumajang perlu memiliki TDRP sebagai dokumentasi awal awalnya. Untuk itu Dinas Perwataan dan Kehutanan Kabupaten Lumajang akan tetap melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penilaian terhadap jené wulu perwataan dengan berpaspor wana jené wulu perwataan memiliki TDRP. Pem-pihak jené wulu perwataan dapat meningkatkan kapasitasnya dalam melaksanakan kegiatan sejauh ini bersama Kepala Dinas Pihang Dinasair yakni Meningkatnya Pengelolaan Daya Tanah Waktu dan Jasa Usaha Perwataan Kabupaten Lumajang.

2.5. Tegangan Aliran Langsung

- Laporan balang hasil
- Laporan rambat hasil
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diperbaiki
- Capaian diperbaiki
- Lain-lain

BAB III
PRINSIP

Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2023 dapat diungkapkan dalam segi sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Kepatuhan Koperasi/kurang berdaya Penitensil Inggris Lampung Nomor 8 Tahun 2021, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperlukan dari 4 (empat) tugas yang ditetapkan dengan 2 (dua) sasaran utama tidak seluruh berhasil diungkapkan dengan baik.

Mengirim,
ATASAN LANGSUNG

KEPALA BIDANG BUDIDAYA PARIWISATA



RICOH IMAGING INDONESIA SDIC
NIP. 19910120 21 0527 1 001

Lampung, 06 Oktober 2023

KOORDINATOR



RICOH IMAGING INDONESIA SDIC
NIP. 19930120 21 0527 1 001

**LAPORAN KINERJA ESELON IV
SEKSI PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA
EKONOMI KREATIF**

Tributan III

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Sumber Daya dan Keterbukaan Ekonomi Kreatif Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja sampai dengan Tributan III Tahun 2023 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun keidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang Ekonomi Kreatif.

Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif merupakan salah satu bagian di Bidang Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang yang dielakptan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 69 Tahun 2016 tentang perubahan SOTK dan penjabaran tugas, pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 69 Tahun 2016, Bidang Ekonomi Kreatif tugas Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif, sarana prasarana ekonomi kreatif serta pengembangan sumber daya dan keterbukaan ekonomi kreatif. Sesuai TUPOKSI Bidang Ekonomi Kreatif, Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif mempunyai tugas :

- a. Perumusan kebijakan teknis, peningkatan kapasitas sumber daya di bidang ekonomi kreatif.

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis peningkatan Kapasitas sumber daya di bidang ekonomi kreatif.
 - c. Pembinaan pelaksanaan etika ekonomi kreatif.
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi peningkatan kapasitas sumber daya di bidang ekonomi kreatif.
 - e. Pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan peningkatan kapasitas sumber daya di bidang ekonomi kreatif.
- f. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

Beksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif mempunyai peran penting dalam mendukung keberhasilan tujuan strategis Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Perindustrian dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang serta dalam mengkoordinasikan proses penerapan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi beserta pencapaiannya Pemerintah (SAKIP).

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Triwulan III Tahun 2023 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Ekonomi Kreasi dengan Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreasi adalah dengan menyatakan menjalankan atau memudahkan 3 (tiga) Target Kinerja dengan 3 (tiga) Sasaran yaitu: 1.) Meningkatnya Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreasi. 2.) Meningkatnya Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kreasi. 3.) Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreasi.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang diperoleh sampai dengan Triwulan III tahun 2023

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023

Sekali Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreasi

Batasan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5 = 60	6
Meningkatnya Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreasi	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreasi	1 laporan	1 laporan	100 %	
Meningkatnya Peningkatan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kreasi	Jumlah SDM Ekonomi Kreasi yang Mengikuti Pelatihan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreasi	100 orang	100 orang	100 %	

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Perekonomian dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumentasi Hasil Monitoring Dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Perekonomian Dan Ekonomi Kreatif	1 dokumen	1 dokumen	100 %	
---	--	-----------	-----------	-------	--

Tabel 2.2
Cost per outcome Tributan III
Seksi Pengeluaran Kapasitas Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

No.	Sasaran/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran Baseline			Kriteria	Skor	
			Pagu	Rasio	%	T	R	%
	Meningkatnya Fasilitasi Proses Kreatif, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreatif, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				0	0	100
	Meningkatnya Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				100	100	100
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Perekonomian dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumentasi Hasil Monitoring Dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Perekonomian dan Ekonomi Kreatif				0	0	0
	Meningkatnya Fasilitasi Proses Kreatif, Produksi, Distribusi Konsumsi dan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreatif, Produksi,	1.681.200.000	1.684.307.000	100.00			100 -67.19

Konservasi Ekonomi Kreatif	Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Daya Manusa						
Meningkatnya Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusa Kreatif	Jumlah 8210 Ekonomi Kreatif yang Mengakui Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusa Ekonomi Kreatif	746.200.000	746.796.000	99.592		100	11.000
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Manusa dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Bobotrendasi Hasil Monitoring Dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Manusa Dan Ekonomi Kreatif	18.000.000	18.000.000	18.00		0	-10.00

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan Analisis atas capaian target kinerja masing-masing indikator-indikator kinerja terhadap setiap strategi ini adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Pengembangan Kompetensi SDM manusia dan ekonomi kreatif tingkat dasar, Meningkatnya Fasilitasi Proses Kreatif, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif, Meningkatnya Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kreatif, Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif

Dalam rangka mendorong pelaksanaan penerapan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Keuaga Instansi Pemerintah dan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjalanan Keuaga, Pelaporan Keuaga

dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja, baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang melalui Bidang Ekonomi Kreatif dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah diperjanjikan, setiap tahun telah memberikan fasilitasi, pembinaan dan bimbingan, baik secara kolktif maupun yang bersifat khusus guna Meningkatnya Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif dengan pagu anggaran Rp 1.681.300.000 dan terrealisasi Rp. 1.664.362.000 dengan capaian 98,99%, Meningkatnya Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kreatif dengan pagu anggaran Rp 796.200.000 dan terrealisasi Rp. 745.785.500 dengan capaian 96,62%, Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan pagu anggaran Rp 19.850.000 dan Imrealsasi Rp. 3.600.000 dengan capaian 18,14%. Berikut adalah urutan capaian dan indikator, sebagai berikut:

1. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif.

Pada awal tahun 2017 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang terdapat bidang baru yaitu Bidang Ekonomi Kreatif. Bidang Ekonomi Kreatif terdiri dari 10 Subsektor. Sampai dengan Triwulan III tahun 2023 telah dilaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan dari 16 subsektor. Berikut ini capaian kinerja jika dianalisis dari :

1.1 Perjanjian Kinerja

- Berdasarkan Perjanjian Kinerja sampai dengan Triwulan III tahun 2023 Setasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif dengan Kepala Bidang Ekonomi Kreatif memiliki target 1 laporan yang dilaksanakan, dan terrealisasi 1 laporan yang dilaksanakan. Maka dalam hal ini kategori capaian kinerja berhasil dengan capaian sebesar 100%.

Tabel 2.1.1
Pencapaian Kinerja
Tributan III Tahun 2023

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
Meningkatnya Fasilitasi Proses Kreatif, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Final Fasilitasi Proses Kreatif, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 laporan	1 laporan	100

- Berdasarkan Rencana Aksi hanya pada Tributan III tahun 2023 Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif dengan Kepala Bidang Ekonomi Kreatif memiliki target 1 laporan yang dilaksanakan, dan terrealisasi 1 laporan yang dilaksanakan. Maka dalam hal ini kategori capaian kinerja belum berhasil dengan capaian sebesar 100%.

Tabel 2.1.2
Pencapaian Kinerja
Tributan III Tahun 2023

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
Meningkatnya Fasilitasi Proses Kreatif, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Final Fasilitasi Proses Kreatif, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 laporan	1 laporan	100

1.2 Realisasi dengan Tahun Lalu

Bidang Ekonomi Kreatif mulai dibentuk tahun 2017, maka untuk perbandingan realisasi dengan tahun lalu dijelaskan dengan tabel dibawah ini.

Tabel 2.2.1
Perbandingan Realisasi Kinerja
Tribulan III Tahun 2023

Satuan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			Rk. 2021	Rk. 2022	Rk. 2023
Meningkatnya Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	(3)	(3)	(3)	(3)

1.3 Perencanaan Strategis

- Berdasarkan Perjanjian Kinerja sampai dengan Tribulan III tahun 2023 Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif dengan Kepala Bidang Ekonomi Kreatif memiliki target 1 laporan yang dilaksanakan, dan terrealisasi 1 laporan yang dilaksanakan. Maka dalam hal ini kategori capaian kinerja Berhasil dengan capaian sebesar 100%

Tabel 2.3.1
Perbandingan Realisasi Kinerja di Akhir Periode KINERJA

Satuan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Akhir KINERJA	Realisasi		Tingkat Kemajuan (Rk.4/Rk.3)
			(1)	(4)	
Meningkatnya Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	(3)	1 Laporan	1 laporan	100

1.4 Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Standar Nasional

Tidak ada perbandingan dengan realisasi kinerja standar nasional.

Tabel 2.4.1

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Rencana Kegiatan	Kelompok Kinerja	Realisasi Th. 2017	Realisasi Nasional	Rat. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)-(4)
Meningkatnya Fasilitasi Proses Konsul, Produksi, Distribusi Konservasi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Konsul, Produksi, Distribusi Komunal, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 laporan	-	-

2. Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

Pada awal tahun 2017 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang terdapat bidang baru yaitu Bidang Ekonomi Kreatif. Bidang Ekonomi Kreatif terdiri dari 10 Subsektor. Sampai dengan Tribulan III tahun 2023 telah dilaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan dari 10 subsektor. Berikut ini capaian kinerja jika dianalisis dan :

2.1 Perjanjian Kinerja

- Berdasarkan Perjanjian Kinerja sampai dengan Tribulan III tahun 2023 Sekal Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif dengan Kapita Bidang Ekonomi Kreatif memiliki target 100 orang yang dilaksanakan, dan terwujud 100 orang yang dilaksanakan. Maka dalam hal ini kategori capaian kinerja berhasil dengan capaian sebesar 100%.

Tabel 3.1.1
Pencapaian Kinerja
Tribulan III Tahun 2023

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaihan
(1)	(2)	(3)	(4)	(3/4) (%)
Meningkatnya Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	100 orang	100 orang	100

- Berdasarkan Rencana Aksi hanya pada Tribulan III tahun 2023 Sasai Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif dengan Kepala Bidang Ekonomi Kreatif memiliki target 100 orang yang diaksanakan, dan terrealiasi 100 orang yang diaksanakan. Maka dalam hal ini kategori capaian kinerja berhenti dengan capaian sebesar 100%.

Tabel 3.1.2
Pencapaian Kinerja
Tribulan III Tahun 2023

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaihan
(1)	(2)	(3)	(4)	(3/4) (%)
Meningkatnya Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	100 orang	100 orang	100

2.2 Realisasi dengan Tahun Lalu

Bidang Ekonomi Kreatif mulai diberlakukan tahun 2017, maka untuk perbandingan realisasi dengan tahun lalu diperlukan dengan tabel dibawah ini.

Tabel 3.2.1
Perbandingan Realisasi Kinerja
Tribulan III Tahun 2023

Kesatuan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Meningkatnya Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kreatif	Jumlah STMIK Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	100 orang	-	100 orang	100 orang

2.3 Perencanaan Strategis

- Berdasarkan Perjanjian Kinerja sampai dengan Tribulan III tahun 2023 Sekal Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif dengan Kepala Bidang Ekonomi Kreatif memiliki target 100 orang yang dilaksanakan, dan terrealiasi 100 orang yang dilaksanakan. Maka dalam hal ini kategori capaian kinerja berhasil dengan capaian sebesar 100%.

Tabel 3.3.1
Perbandingan Realisasi Kinerja t.d Akhir Periode RENSTRA

Satuan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi		Tingkat Kemajuan (5=5/3)
			(2)	(4)	
(1)	(3)	(5)	(6)	(7=6/3)	
Meningkatnya Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kreatif	Jumlah STMIK Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	100 orang	100 orang	100	

2.4 Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Standar Nasional

Tidak ada perbandingan dengan realisasi kinerja standar nasional.

Tabel 3.4.1
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Kriteria Kinerja	Institutor Kinerja	Realisasi Th. 2023	Realisasi Nasional	Rat. (+/-)
(1) Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Kreatif yang Mengikuti Penilaian Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	100 (uang)	(4)	(5+3/1)

3. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pada awal tahun 2017 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang terdapat bidang baru yaitu Bidang Ekonomi Kreatif. Bidang Ekonomi Kreatif terdiri dari 16 Subsektor. Sampai dengan Triwulan III tahun 2023 telah dilaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan dari 16 subsektor. Berikut ini capaian kinerja pka dianalisis dan :

3.1 Perjanjian Kinerja

- Berdasarkan Perjanjian Kinerja sampai dengan Triwulan III tahun 2023 Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif dengan Kepala Bidang Ekonomi Kreatif memiliki target 1 dokumen yang dilaksanakan, dan termasuk 0 dokumen yang dilaksanakan. Maka dalam hal ini kategori capaian kinerja belum berhasil dengan capaian sebesar 0%.

Tabel 4.1.1
Pencapaian Kinerja
Triwulan III Tahun 2023

Kriteria	Institutor	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1) Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumentasi Monitoring Dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1 dokumen	0 dokumen	0

- Berdasarkan Rencana Aksi hanya pada Tributan III tahun 2023 Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif dengan Kepala Bidang Ekonomi Kreatif memiliki target 0 dokumen yang dilaksanakan, dan terlaksana 0 dokumen yang dilaksanakan. Maka dalam hal ini kategori capaian kinerja belum berhasil dengan capaian sebesar 0%.

Tabel 4.1.2
Pencapaian Kinerja
Tributan III Tahun 2023

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumentasi Hasil Monitoring Dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	0 dokumen	0 dokumen	0

4.2 Realisasi dengan Tahun Lalu

Bidang Ekonomi Kreatif mulai dibentuk tahun 2017, maka untuk perbandingan realisasi dengan tahun lalu dijelaskan dengan tabel dibawah ini.

Tabel 4.2.1
Perbandingan Realisasi Kinerja
Tributan III Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			Tb. 2022	Tb. 2023	Tb. 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumentasi Hasil Monitoring Dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1 dokumen	-	-	0 dokumen

3.3 Perencanaan Strategis

- Berdasarkan Pengaruh Kinerja sampai dengan Triwulan III tahun 2023 Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif dengan Kepala Bidang Ekonomi Kreatif memiliki target 1 dokumen yang dilaksanakan, dan terlaksana 0 dokumen yang dilaksanakan. Maka dalam hal ini kategori capaian kinerja belum berhasil dengan capaian sebesar 0%.

Tabel 4.3.1
Perbandingan Realisasi Kinerja di Akhir Periode RENSTRA

Kawasan Kegiatan	Inisiatif Kinerja	Tujuan Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Komajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring Dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1 dokumen	0 dokumen	0

3.4 Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Standar Nasional

Tidak ada perbandingan dengan realisasi kinerja standar nasional.

Tabel 4.4.1
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Kawasan Kegiatan	Inisiatif Kinerja	Realisasi Th. 2023	Realisasi Nasional	Ket. (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)/(4)
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring Dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1 dokumen	-	-

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif kepada kelompok masyarakat yang telah mendapat pelatihan diperlukan

pembinaan dan bimbingan berkelanjutan yang meliputi pengembangan kelembagaan, peningkatan ketrampilan kerja, peningkatan design produk, pemasaran dan pendukung. Kegiatan tersebut berujuan meningkatkan sinergi antara mereka dalam memproduksi dan mengembangkan diri serta meningkatkan pendapatan.

B. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteki ulang
- Capaian diulang
- Lain-lain: _____